

Laporan Dampak

# Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah Periode 2016- 2019

21 Februari 2020

---



Disusun oleh tim Greeneration Foundation



Jambore  
Indonesia Bersih  
& Bebas Sampah

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN	4
PROFIL	5
Bergerak Indonesia Bebas Sampah (BIBS)	5
Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (JIBBS)	6
DATA PESERTA JAMBORE IBBS	7
Data Persebaran Peserta Jambore	7
Data Jenis Instansi Peserta Jambore	8
Data Kuantitas Kehadiran Peserta Jambore	9
SURVEY DAMPAK JAMBORE IBBS	10
Data Responden Survey	10
Survey Pelaksanaan Jambore IBBS	12
Survey Dampak Jambore IBBS	18
PROGRAM LANJUTAN PASCA JAMBORE IBBS	22
Workshop Sinkronisasi <i>Stakeholder</i> Bidang Persampahan	22
Aspirasi Penegakan Peraturan Persampahan Indonesia	23
Aksi Bersih Serentak Indonesia Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia	24
Kajian Standardisasi Pembiayaan Pengelolaan Persampahan	25
Pemberdayaan Masyarakat “Bijak Kelola Sampah” di Delapan Provinsi	26
PROFIL PESERTA JAMBORE IBBS	27
Tini Martini Tapran - Jawa Barat	27
Faesal Adam - Kudus Jawa Tengah	28
Hamzah - Kalimantan Timur	29
Andi Nurdianza - Sulawesi Selatan	30
Renung Rubiyatadji - Jawa Timur	31
Yanto - Jawa Barat	32
Gemal Bakrie - Aceh	33
Syalfitri - Sumatera Selatan	34
Virly Yuriken - Papua Barat	35
Iskandar Abd. Rahman - Maluku Utara	36



## KATA PENGANTAR

Jambore #BebasSampah yang kemudian diperluas menjadi Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (IBBS) adalah inisiatif para penggerak dan pegiat peduli persampahan di tingkat akar rumput di seluruh Indonesia. Semangat diselenggarakannya Jambore IBBS ini bukan hanya menjadi momentum berkumpulnya para pegiat peduli persampahan di seluruh Indonesia,



namun juga sebagai wadah bertukar informasi dan berembuk oleh seluruh *stakeholder* untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam rangka percepatan pencapaian target menuju Indonesia bersih dan bebas sampah pada tahun 2020. Jambore IBBS dari tahun ke tahun sudah menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, antara lain, identifikasi 13 isu dalam sektor persampahan yang terus didiskusikan untuk dapat menghasilkan solusi persampahan, Aspirasi Penegakkan Peraturan Persampahan yang telah ditandatangani oleh 10.000 masyarakat secara online dan offline, dan rekomendasi adanya standar pembiayaan berbasis pengelolaan sampah yang baik, benar dan bertanggung jawab melalui skema pembiayaan berkeadilan yang telah diimplementasikan dengan dilakukannya kajian mengenai standarisasi pembiayaan pengelolaan persampahan.

Jambore IBBS tidak akan dapat terselenggara dengan sukses tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah luar negeri, sektor swasta, lembaga donor dan filantropi, para pakar dan akademisi, serta para pegiat peduli persampahan di seluruh Indonesia. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk pendanaan, logistik pendukung acara, narasumber, dan dukungan dalam bentuk lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pegiat peduli persampahan di seluruh Indonesia yang selalu semangat dalam menyukseskan penyelenggaraan Jambore IBBS baik sebagai panitia maupun peserta dengan menjunjung tinggi nilai kerelawanan.

Harapan saya untuk Jambore IBBS di tahun-tahun berikutnya, tidak hanya diselenggarakan secara nasional melainkan juga melahirkan inisiatif-inisiatif kolaborasi lokal antara pegiat peduli persampahan dan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam sektor persampahan untuk menyelenggarakan Jambore IBBS di tingkat daerah secara masif. Dengan begitu, ide dan gagasan untuk menciptakan Indonesia bersih dan bebas sampah tidak hanya bersifat terpusat melainkan juga relevan dengan konteks permasalahan persampahan di daerah di Indonesia.

Salam Indonesia Bersih dan Bebas Sampah!

**M. Bijaksana Junerosano**

---

## RINGKASAN

**Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (IBBS)** merupakan momen strategis berkumpulnya seluruh pegiat peduli persampahan di Indonesia yang mewakili lima aktor perubahan yaitu masyarakat sipil, pemerintah, swasta, media, dan tokoh masyarakat. Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah menjadi sangat penting karena kegiatan ini dapat memberikan berbagai keluaran positif. Pertama, sebagai forum komunikasi nasional dalam hal pertukaran informasi, pengalaman, dan pembelajaran. Kedua, sebagai momen perumusan rencana aksi bersama untuk percepatan pengelolaan persampahan di Indonesia, yang nantinya diharapkan dapat diturunkan ke daerahnya masing-masing. Ketiga, untuk mengaktivasi aktor-aktor pegiat peduli persampahan di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia agar memiliki pesan yang sama, sekaligus mempererat kolaborasi dengan sesama pegiat peduli persampahan seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengevaluasi sekaligus mengukur dampak pelaksanaan Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah selama empat tahun, Greeneration Foundation yang bertindak sebagai payung hukum Bergerak Indonesia Bebas Sampah (BIBS) melaksanakan Survey Dampak Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah Periode 2016-2019. Survei yang dilaksanakan pada 28 Februari 2020 hingga 15 Maret 2020 dengan jumlah 106 responden menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan Jambore IBBS bernilai “sangat baik” dengan skor rata-rata 4,05, sedangkan kepuasan secara umum terhadap Jambore IBBS bernilai “baik” dengan skor rata-rata 4,03. Selain itu, secara umum responden menyatakan memiliki ekspektasi sebelum menghadiri Jambore IBBS yaitu untuk saling bertukar informasi, membangun relasi, dan membangun gerakan di daerah bersama alumni Jambore lainnya. Dari ekspektasi tersebut, responden menyatakan “biasa saja” bahwa saat menghadiri Jambore IBBS ekspektasi mereka telah tercapai dengan skor rata-rata 3,77. Responden secara umum juga menyatakan “setuju” bahwa mereka dapat mengimplementasikan rencana aksi dan pengetahuan yang diperoleh pada saat menghadiri Jambore IBBS terhadap pengurangan dan penanganan sampah dengan skor rata-rata 3,92 dan menyatakan “sangat setuju” bahwa Jambore IBBS bermanfaat untuk pribadi responden sebagai pegiat peduli persampahan dengan skor rata-rata 4,44.

Pasca pelaksanaan Jambore IBBS tiap tahunnya berhasil menghasilkan berbagai program lanjutan, antara lain, Workshop Sinkronisasi Stakeholder Bidang Persampahan di Kota Solo pada tahun 2016, peluncuran Aspirasi Penegakan Peraturan Persampahan Indonesia pada peringatan Peduli Sampah Nasional (#PESAN) tahun 2018, Aksi Bersih Serentak Indonesia Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia di 34 provinsi pada tahun 2018, Kajian Standarisasi Pembiayaan Pengelolaan Persampahan pada tahun 2019, dan Pemberdayaan Masyarakat “Bijak Kelola Sampah” di 8 provinsi pada tahun 2019-2020.

# PROFIL

## Bergerak Indonesia Bebas Sampah (BIBS)

Bergerak menuju Indonesia Indonesia Bebas Sampah (BIBS) dilatarbelakangi oleh tragedi TPA Leuwigajah yang menewaskan 143 warga, mengubur 71 rumah dan 2 kampung yaitu Kampung Cilimus dan Kampung Gunung Aki. Tragedi yang terjadi pada 21 Februari 2005 dinobatkan sebagai tragedi terburuk kedua di dunia setelah tragedi di Payatas, Filipina pada tahun 2000. Untuk mengenang tragedi tersebut, pada tahun 2006, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada tanggal 21 Februari 2006.<sup>1</sup>

Gerakan ini akhirnya lahir untuk merespon Deklarasi Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020 yang dideklarasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah (Bupati/Walikota), unsur pengusaha (Kadin), organisasi keagamaan seperti NU, Parisada Hindu Dharma, WALUBI dan unsur masyarakat lainnya, pada Hari Peduli Sampah Nasional 2014.<sup>2</sup> Gerakan ini memilih kata “Bebas Sampah” merujuk pada definisi *zero waste* dalam bahasa Inggris yaitu filsafat yang mendorong perancangan ulang daur sumberdaya, dari sistem linier menuju siklus tertutup (*circular*), sehingga semua produk digunakan kembali.<sup>3</sup>

Bergerak Indonesia Bebas Sampah (BIBS) merupakan gerakan partisipatif yang memfasilitasi peran dan komunikasi multipihak dalam menjawab tantangan persampahan di Indonesia. Inisiatif BIBS terbentuk dari semangat kerelawanan para individu dan komunitas dari berbagai wilayah di Indonesia.

Visi:

Sebuah wadah partisipatif yang memfasilitasi peran serta multipihak dalam membangun ekosistem Indonesia bersih dan bebas sampah.

Misi:

- Membangun kekuatan elemen masyarakat dalam berkolaborasi
- Mendorong masyarakat sipil, pemerintah, swasta, media, dan akademisi dalam advokasi dan mendorong adanya kajian-kajian isu persampahan

<sup>1</sup> Franck Lavigne, et al. “The 21 February 2005, catastrophic waste avalanche at Leuwigajah dumpsite, Bandung, Indonesia,” *Geoenvironmental Disasters* 1, 10 (2014). <https://doi.org/10.1186/s40677-014-0010-5>

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Hari Peduli Sampah 2014: Indonesia Bersih 2020,” diakses pada 2 Februari 2020, <http://www.menlh.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih-2020>

<sup>3</sup> Wikipedia, “Bebas Sampah,” diakses pada 2 Februari 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bebas\\_sampah](https://id.wikipedia.org/wiki/Bebas_sampah)

---

## Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (JIBBS)

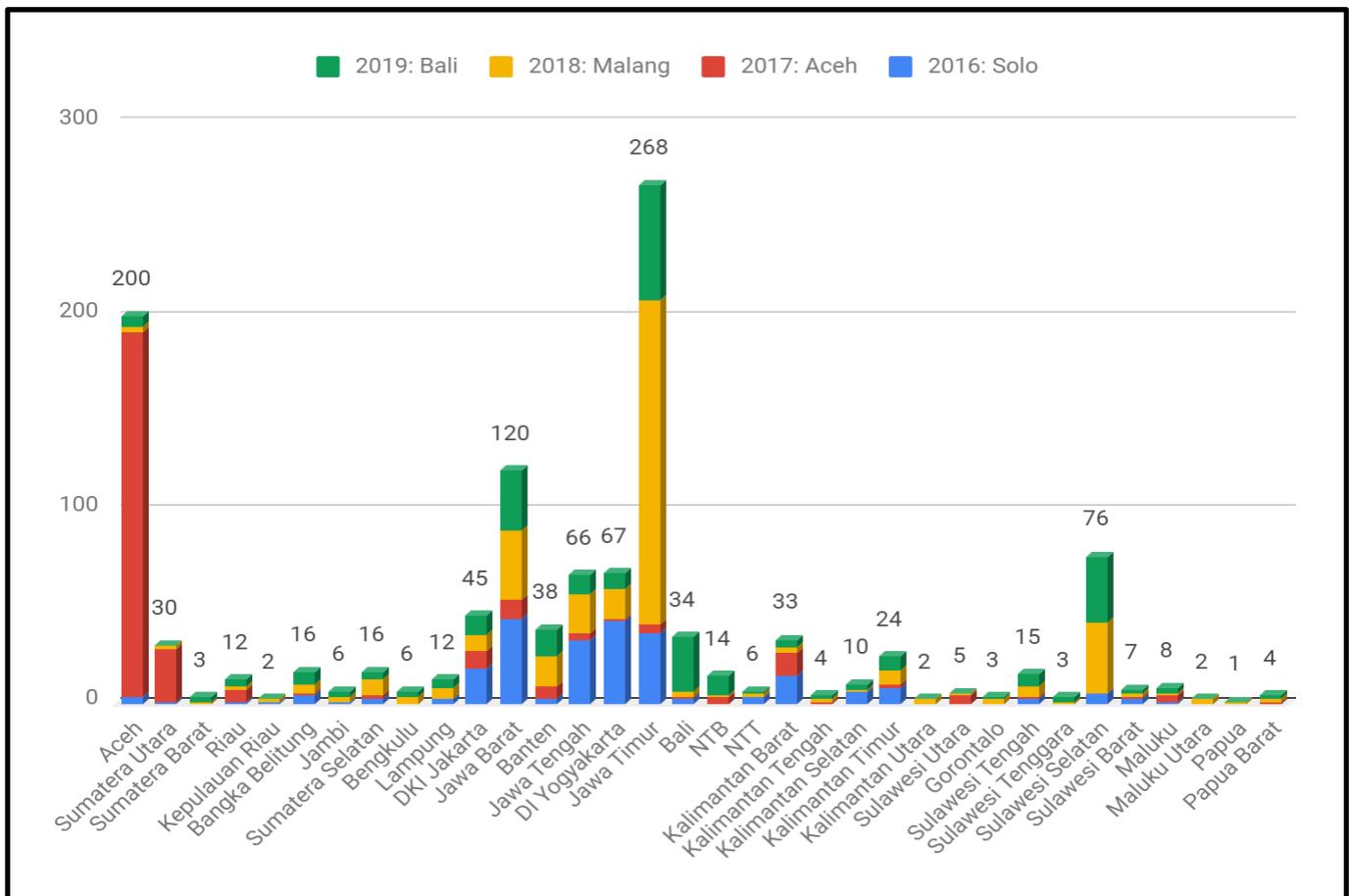
Salah satu aktivitas dari Gerakan Indonesia Bebas Sampah adalah Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (JIBBS) yang merupakan momen strategis berkumpulnya seluruh pegiat peduli persampahan di Indonesia yang mewakili lima aktor perubahan diantaranya masyarakat sipil, pemerintah, swasta, media, dan tokoh masyarakat, baik secara individu maupun mewakili komunitas/lembaganya.

Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah menjadi sangat penting karena kegiatan ini dapat memberikan berbagai keluaran positif. Pertama, sebagai forum komunikasi nasional dalam hal pertukaran informasi, pengalaman, dan pembelajaran. Kedua, sebagai momen perumusan rencana aksi bersama untuk percepatan pengelolaan persampahan di Indonesia, yang nantinya diharapkan dapat diturunkan ke daerahnya masing-masing. Ketiga, untuk mengaktivasi aktor-aktor pegiat peduli persampahan di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia agar memiliki pesan yang sama, sekaligus mempererat kolaborasi dengan sesama pegiat peduli persampahan seluruh Indonesia.

Jambore #BebasSampah yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 2-4 September 2016 yang dihadiri 234 perwakilan dari 22 provinsi di Indonesia. Kemudian, pada pelaksanaan Jambore #BebasSampah kedua di Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 10-12 November 2017 dihadiri oleh 290 perwakilan dari 21 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, pada pelaksanaan Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah ketiga di Malang Raya, Jawa Timur pada tanggal 13-15 September 2018 dihadiri oleh 367 perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia. Adapun pada pelaksanaan Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah yang keempat pada tanggal 10-12 Oktober 2019 di Provinsi Bali dihadiri 268 perwakilan dari 28 provinsi di Indonesia.

# DATA PESERTA JAMBORE IBBS

## Data Persebaran Peserta Jambore



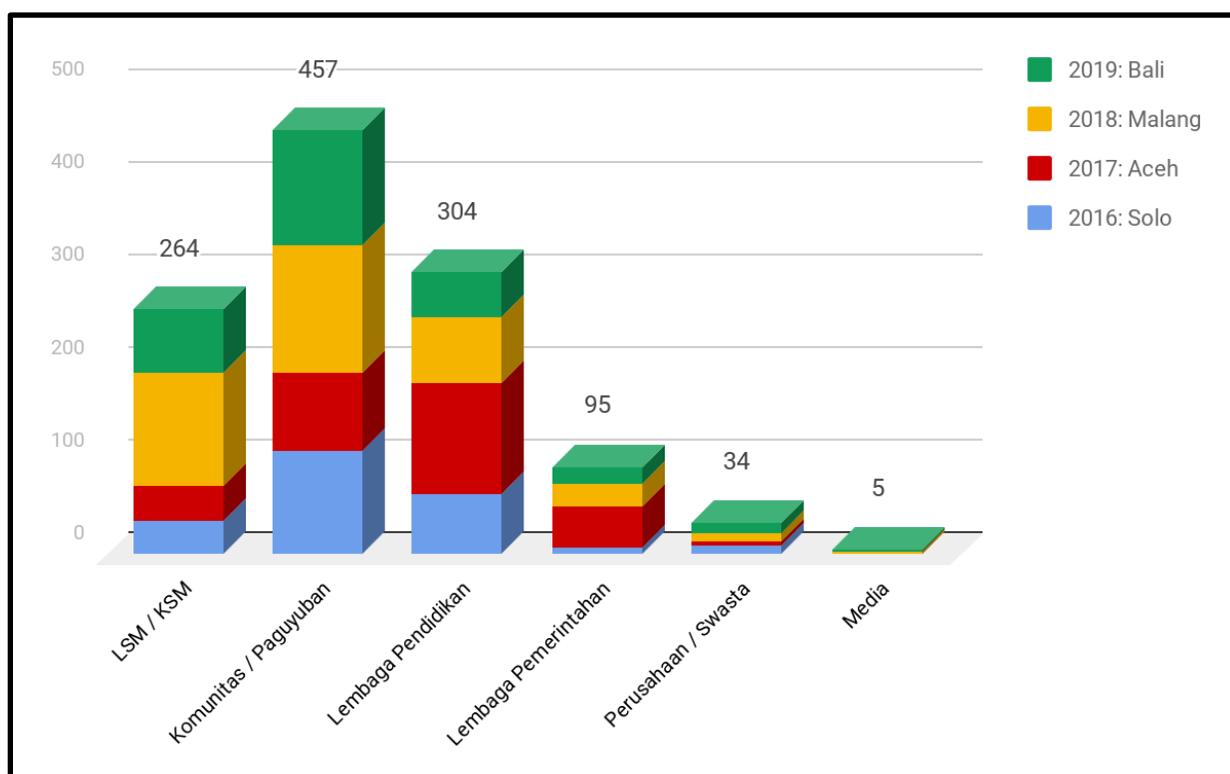
Grafik 1.1 Persebaran Peserta Jambore IBBS berdasarkan Provinsi Periode 2016-2019

Secara umum, grafik persebaran peserta Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (IBBS) berdasarkan provinsi periode 2016-2019 di atas menunjukkan bahwa lokasi penyelenggaraan Jambore IBBS mempengaruhi keterwakilan provinsi domisili peserta. Provinsi Jawa Timur mengirimkan peserta terbanyak dengan jumlah total 268 perwakilan, diikuti oleh provinsi Aceh sejumlah 200 perwakilan, dan provinsi Jawa Barat sejumlah 120 perwakilan.

Secara detail, sebaran peserta Jambore IBBS berdasarkan provinsi setiap tahun nya beragam. Dimulai dari pelaksanaan Jambore IBBS pertama yang diselenggarakan di Kota Solo pada tahun 2016, mayoritas peserta berasal dari provinsi Jawa Barat dengan jumlah 44 orang, kemudian diikuti oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 43 orang, dan provinsi Jawa Timur sejumlah 36 orang. Sedangkan, pada pelaksanaan Jambore IBBS kedua yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada tahun 2017, sebagian besar peserta berdomisili di provinsi Aceh dengan jumlah 189 peserta, selanjutnya diikuti oleh provinsi Sumatera Utara sejumlah 27 peserta, dan provinsi Kalimantan Barat sejumlah 12 peserta. Kemudian, pada pelaksanaan Jambore IBBS ketiga yang diselenggarakan di Malang Raya pada tahun 2018, peserta yang hadir mayoritas berdomisili di provinsi Jawa Timur dengan jumlah 167 perwakilan, yang diikuti oleh 37 perwakilan dari provinsi Sulawesi Selatan, dan 35 perwakilan dari provinsi Jawa Barat. Adapun, pelaksanaan Jambore IBBS terakhir di Bali pada tahun 2019 dihadiri oleh peserta yang sebagian besar berasal

dari provinsi Jawa Timur dengan jumlah 60 orang, selanjutnya diikuti oleh 34 perwakilan dari provinsi Sulawesi Selatan, dan 31 perwakilan dari provinsi Jawa Barat.

### Data Jenis Instansi Peserta Jambore



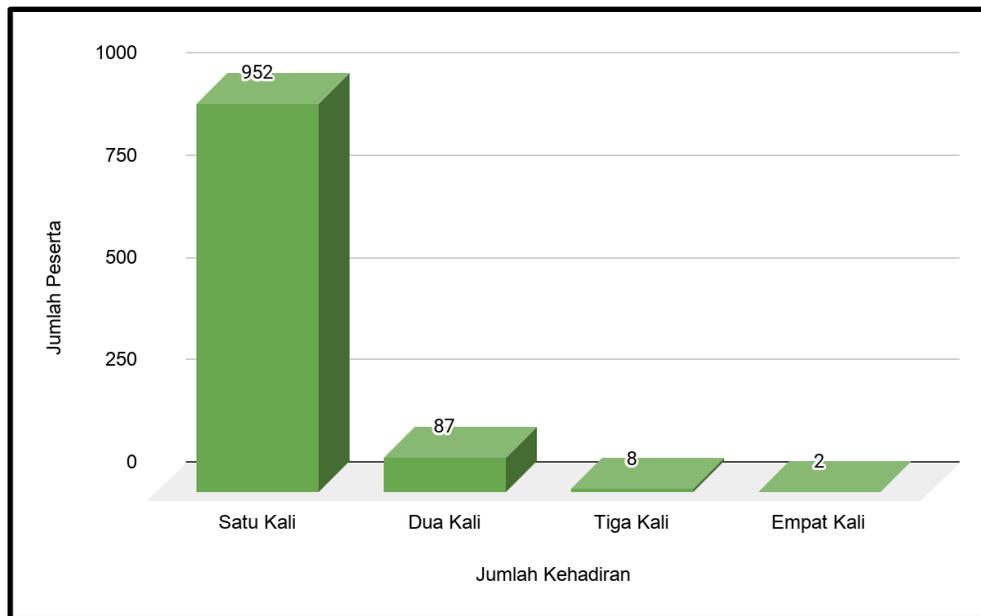
Grafik 1.2 Persebaran Peserta Jambore IBBS berdasarkan Jenis Instansi Periode 2016-2019

Grafik persebaran peserta Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (IBBS) berdasarkan jenis instansi periode 2016-2019 di atas menunjukkan bahwa secara umum jenis instansi yang paling banyak diwakili ialah Komunitas / Paguyuban dengan jumlah total 457 perwakilan, diikuti oleh Lembaga Pendidikan sejumlah 304 perwakilan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat / Kelompok Swadaya Masyarakat sejumlah 264 perwakilan.

Secara detail, sebaran peserta Jambore IBBS berdasarkan jenis instansi setiap tahun nya seragam, dimana mayoritas didominasi oleh pegiat peduli persampahan yang tergabung dalam instansi Komunitas / Paguyuban. Dimulai dari pelaksanaan Jambore IBBS pertama yang diselenggarakan di Kota Solo pada tahun 2016, mayoritas peserta berasal dari Komunitas / Paguyuban dengan jumlah 113 orang, kemudian diikuti oleh Lembaga Pendidikan sejumlah 65 orang, dan LSM / KSM sejumlah 36 orang. Sedangkan, pada pelaksanaan Jambore IBBS kedua yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada tahun 2017, sebagian besar peserta tergabung dalam Lembaga Pendidikan dengan jumlah 120 peserta, selanjutnya diikuti oleh Komunitas / Paguyuban sejumlah 84 peserta, dan Lembaga Pemerintahan sejumlah 43 peserta. Kemudian, pada pelaksanaan Jambore IBBS ketiga yang diselenggarakan di Malang Raya pada tahun 2018, peserta yang hadir mayoritas berasal dari Komunitas / Paguyuban dengan jumlah 137 perwakilan, yang diikuti oleh 122 perwakilan dari LSM / KSM, dan 71 perwakilan dari Lembaga Pendidikan. Adapun, pelaksanaan Jambore IBBS terakhir di Bali pada tahun 2019 dihadiri oleh peserta yang sebagian besar berasal dari Komunitas / Paguyuban dengan jumlah 123 orang,

selanjutnya diikuti oleh 67 perwakilan dari LSM / KSM, dan 48 perwakilan dari Lembaga Pendidikan.

### Data Kuantitas Kehadiran Peserta Jambore

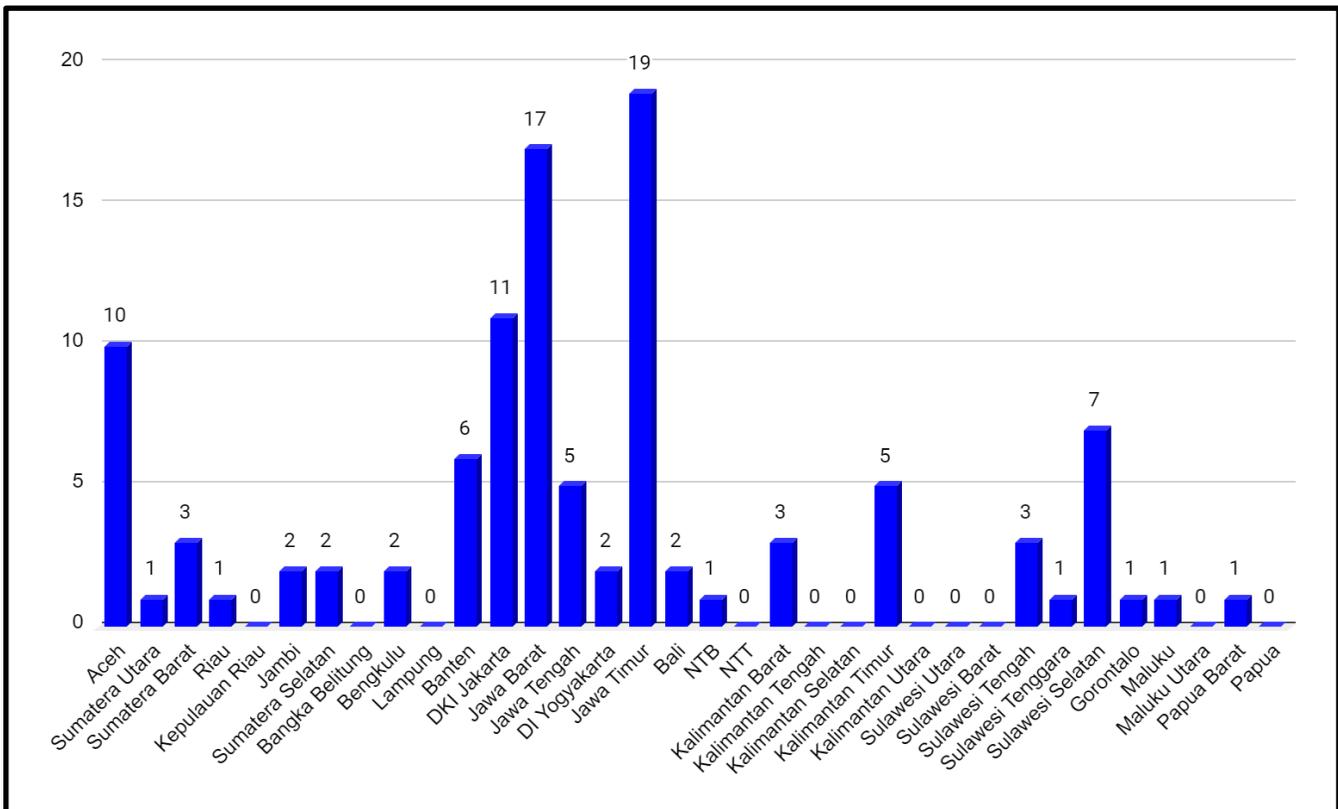


Grafik 1.3 Kuantitas Kehadiran Peserta Jambore IBBS Periode 2016-2019

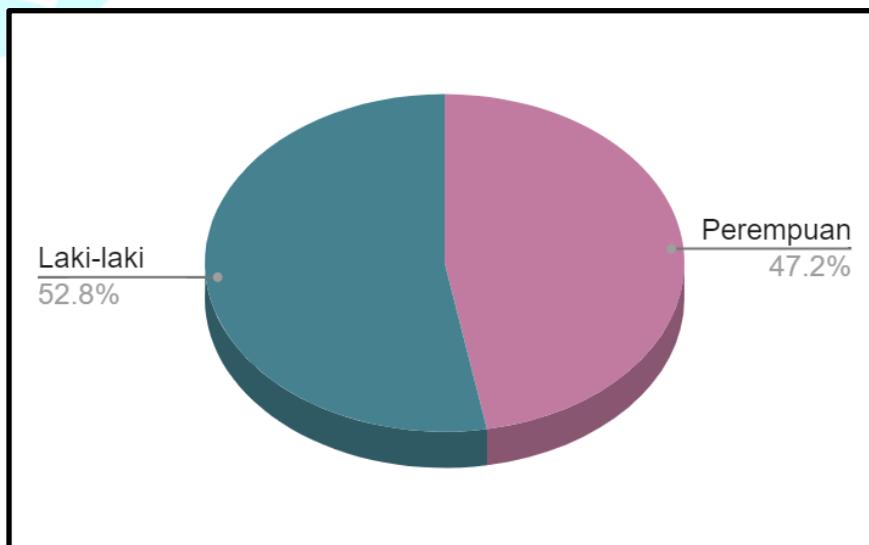
Grafik kuantitas kehadiran peserta Jambore IBBS periode 2016-2019 di atas menunjukkan bahwa mayoritas peserta menghadiri Jambore IBBS sebanyak satu kali dengan jumlah total 952 orang, sedangkan peserta yang menghadiri Jambore IBBS sebanyak dua kali berjumlah 87 orang. Adapun delapan peserta menghadiri Jambore IBBS sebanyak tiga kali dan dua orang menghadiri keseluruhan pelaksanaan Jambore IBBS selama empat tahun. Keseluruhan pelaksanaan Jambore IBBS periode 2016-2019 dihadiri oleh 1.050 orang yang berbeda dari jumlah total 1.159 peserta.

# SURVEY DAMPAK JAMBORE IBBS

## Data Responden Survey

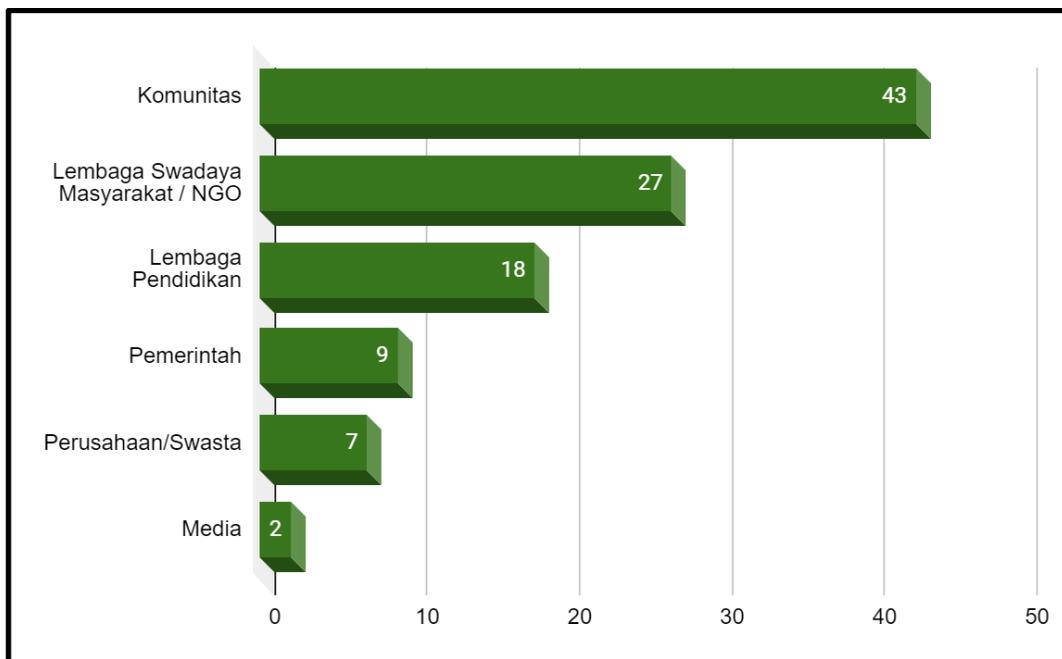


Grifik 2.1 Persebaran Responden Survey Dampak Jambore IBBS berdasarkan Provinsi



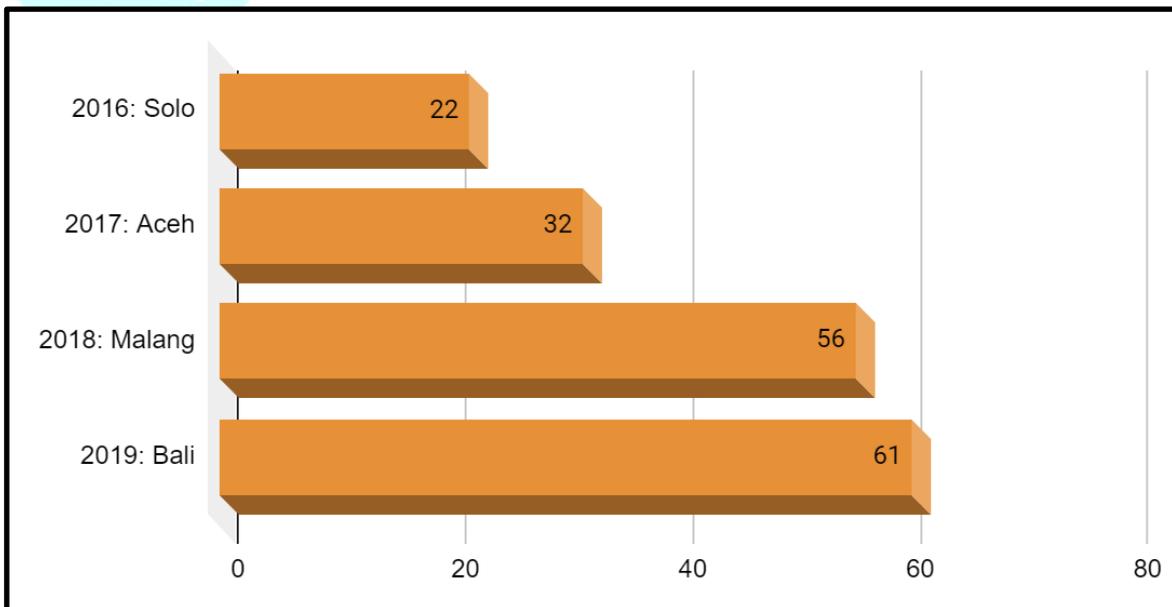
Grifik 2.2 Persebaran Responden Survey Dampak Jambore IBBS berdasarkan Jenis Kelamin



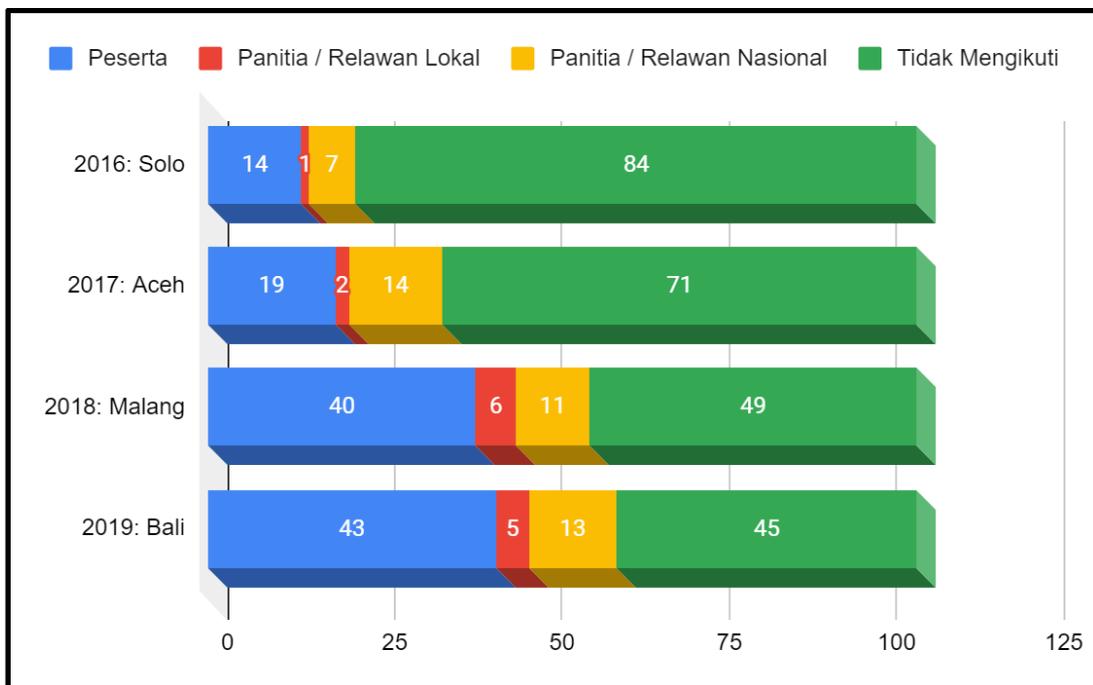


Grafik 2.3 Persebaran Responden Survey Dampak Jambore IBBS berdasarkan Jenis Instansi

Sebelum penulis menyusun Laporan Dampak Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah, tim Greeneration Foundation menyebarkan kuesioner daring melalui Google Form [bit.ly/SurveyDampakJIBBS](http://bit.ly/SurveyDampakJIBBS) yang disebar pada 28 Februari 2020 hingga 15 Maret 2020. Kuesioner daring tersebut diisi oleh 106 responden yang tersebar di 23 provinsi yang didominasi oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Selain itu, representasi jenis kelamin responden cukup berimbang di mana representasi laki-laki sedikit lebih mendominasi dibanding perempuan. Responden survei ini juga aktif tergabung di dalam enam jenis instansi berbeda yang didominasi oleh perwakilan Komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat.



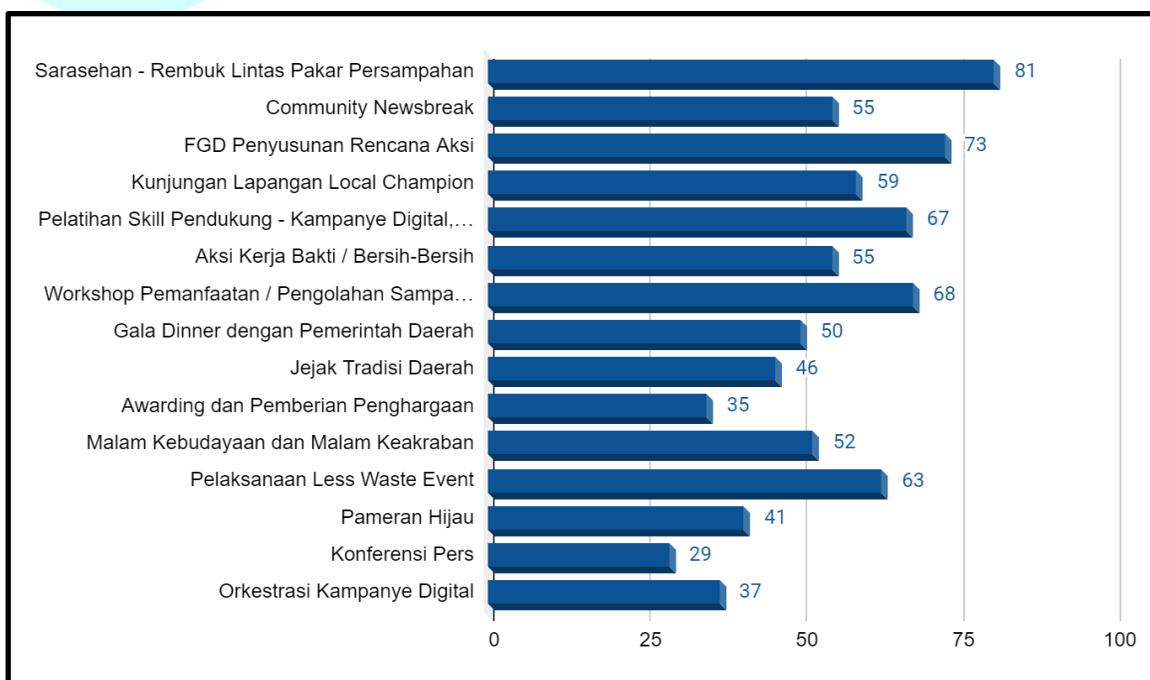
Grafik 2.5 Kehadiran Responden pada Pelaksanaan Jambore IBBS Periode 2016-2019



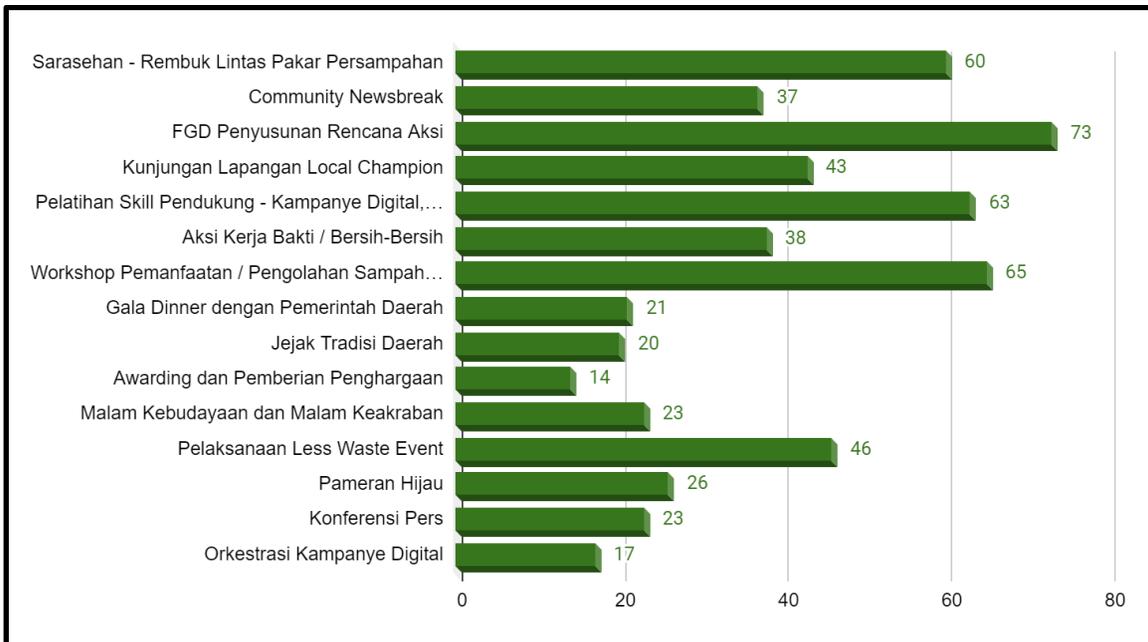
Grafik 2.6 Peran Responden pada Pelaksanaan Jambore IBBS Periode 2016-2019

Karena maksud dan tujuan dari survei ini ialah untuk mengevaluasi dan mengukur dampak dari Jambore IBBS yang telah dilaksanakan pada 2016-2019, maka responden yang mengisi kuesioner daring seluruhnya telah mengikuti Jambore IBBS minimal satu kali yang didominasi oleh partisipan dari pelaksanaan Jambore IBBS 2019 di Bali dan Jambore IBBS 2018 di Malang Raya. Mayoritas responden berperan sebagai peserta maupun panitia / relawan nasional Jambore IBBS.

### Survey Pelaksanaan Jambore IBBS

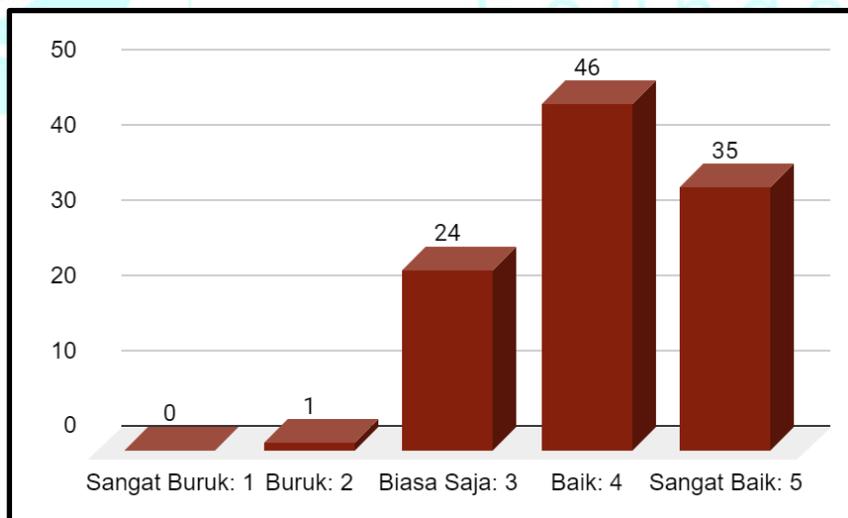


Grafik 3.1 Jajak Pendapat Sesi Kegiatan Jambore IBBS Periode 2016-2019 Paling Menarik



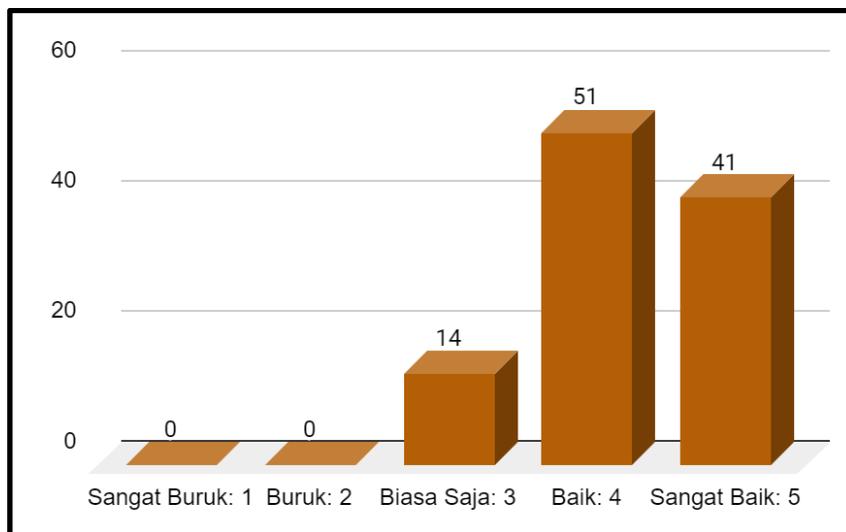
Grafik 3.2 Jajak Pendapat Sesi Kegiatan Jambore IBBS Periode 2016-2019 Paling Bermanfaat

Dari grafik jajak pendapat di atas menunjukkan sesi kegiatan yang paling diminati maupun dianggap paling bermanfaat di dalam rangkaian pelaksanaan Jambore IBBS Periode 2016-2019. Adapun sesi kegiatan yang paling diminati antara lain Sarasehan - Rembuk Lintas Pakar Persampahan, FGD Penyusunan Rencana Aksi, dan Workshop Pemanfaatan / Pengolahan Sampah. Sedangkan, untuk sesi kegiatan yang dianggap paling bermanfaat antara lain FGD Penyusunan Rencana Aksi, Workshop Pemanfaatan / Pengolahan Sampah, dan Pelatihan Skill Pendukung.



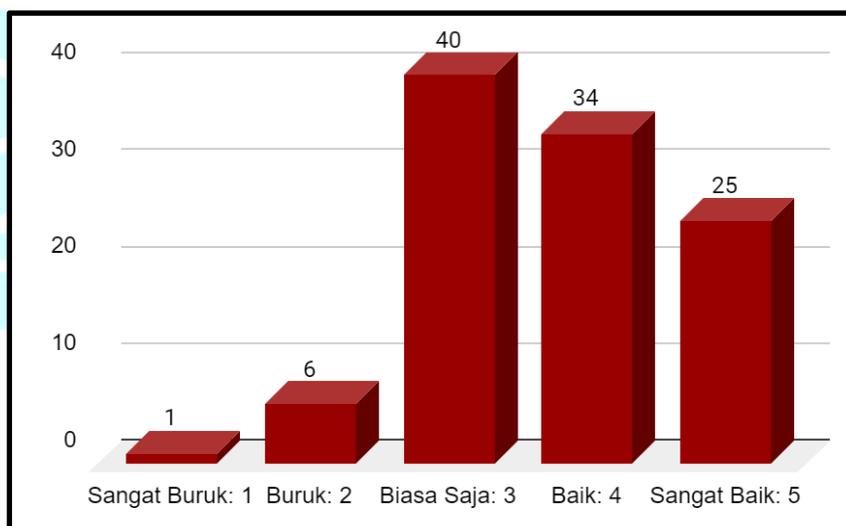
Grafik 3.3 Jajak Pendapat Konten Acara Jambore IBBS Periode 2016-2019



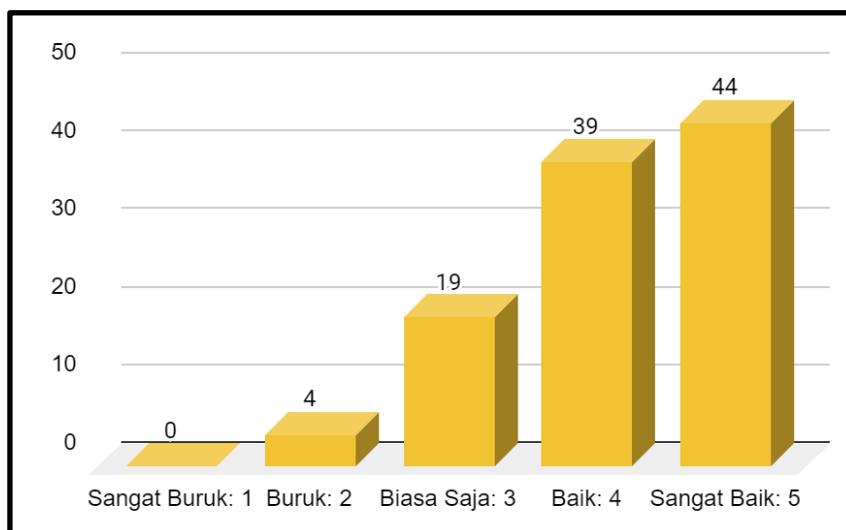


Grafik 3.4 Jajak Pendapat Narasumber Jambore IBBS Periode 2016-2019

Grafik jajak pendapat di atas menunjukkan tingkat kepuasan dalam hal konten acara dan narasumber / pengisi acara Jambore IBBS Periode 2016-2019. Mayoritas responden sejumlah 46 orang menyatakan konten acara Jambore IBBS secara keseluruhan “baik” dengan skor rata-rata 4,08. Begitu pula terkait narasumber yang mengisi selama acara Jambore IBBS, 51 responden menilai “baik” dengan skor rata-rata 4,25.



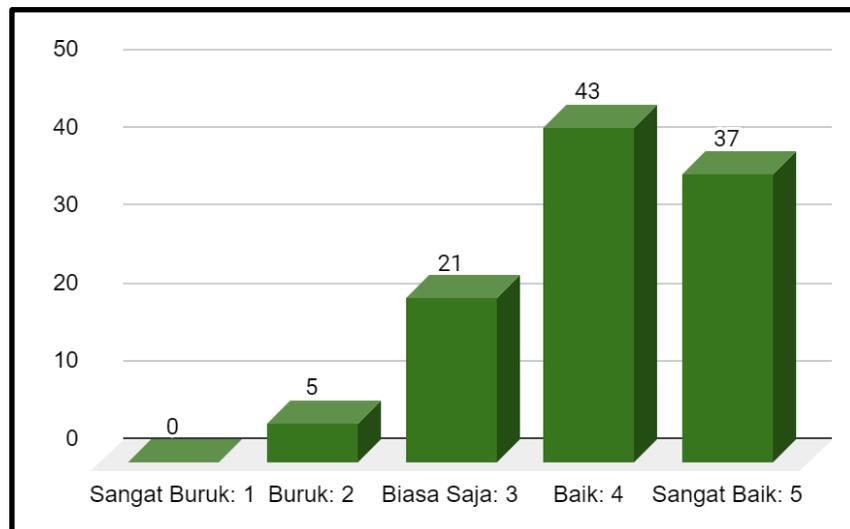
Grafik 3.5 Jajak Pendapat Koordinasi Panitia dengan Peserta Jambore IBBS Periode 2016-2019



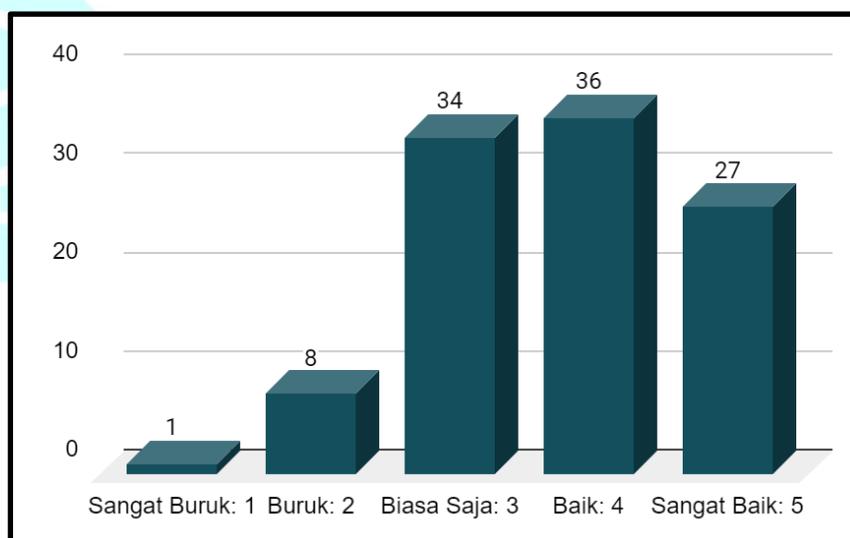
Grafik 3.6 Jajak Pendapat Penerapan *Less Waste* Jambore IBBS Periode 2016-2019



Grafik jajak pendapat di atas menunjukkan tingkat kepuasan dalam hal koordinasi panitia dengan peserta dan penerapan *less waste* selama pelaksanaan Jambore IBBS Periode 2016-2019. Mayoritas responden sejumlah 40 orang menyatakan koordinasi panitia pelaksana dengan peserta Jambore IBBS secara keseluruhan “biasa saja” dengan skor rata-rata 3,72. Sedangkan, terkait penerapan *less waste* selama pelaksanaan Jambore IBBS, 44 responden menilai “sangat baik” dengan skor rata-rata 4,16.

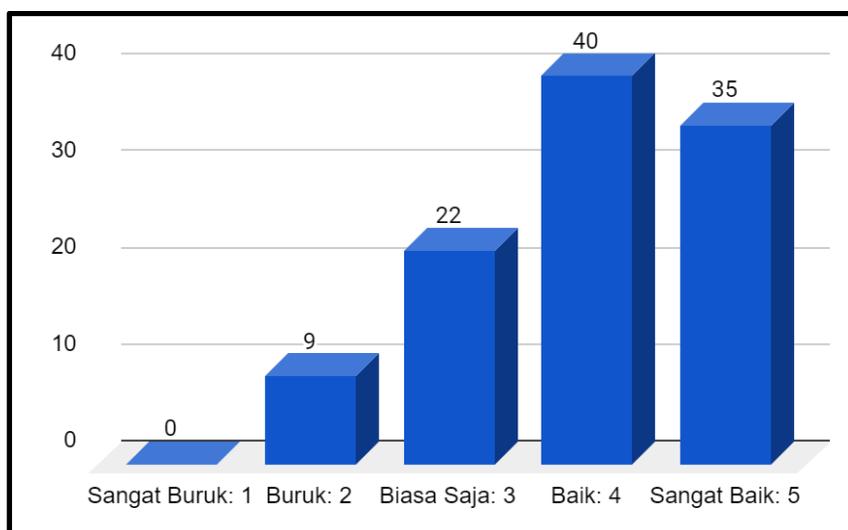


Grafik 3.7 Jajak Pendapat Lokasi Pelaksanaan Jambore IBBS Periode 2016-2019

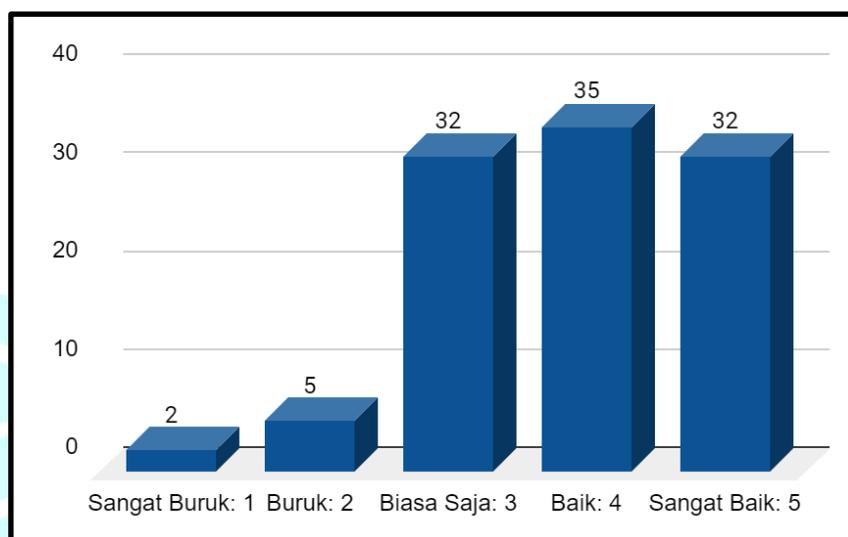


Grafik 3.8 Jajak Pendapat Fasilitas Penunjang Jambore IBBS Periode 2016-2019

Grafik jajak pendapat di atas menunjukkan tingkat kepuasan dalam hal lokasi dan fasilitas penunjang acara Jambore IBBS Periode 2016-2019. Mayoritas responden sejumlah 43 orang menyatakan lokasi acara Jambore IBBS secara keseluruhan “baik” dengan skor rata-rata 4,06. Begitu pula terkait fasilitas penunjang acara Jambore IBBS, 36 responden menilai “baik” dengan skor rata-rata 3,75.

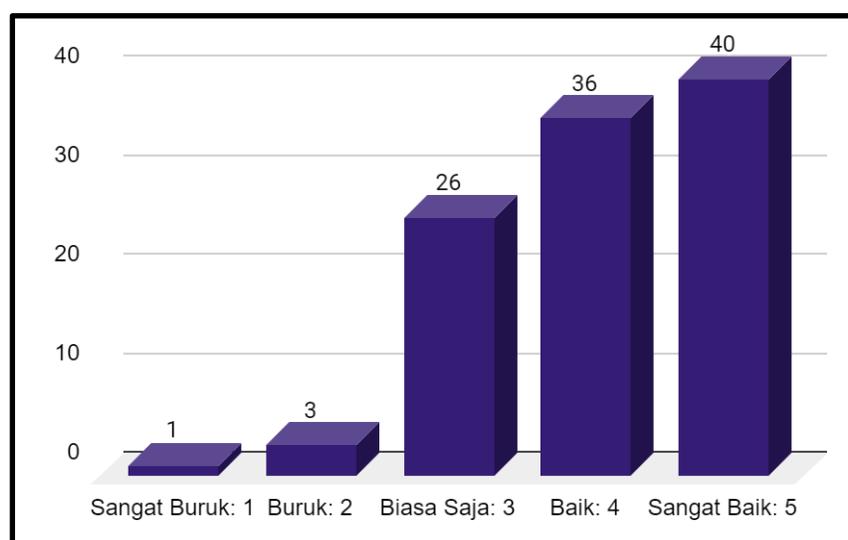


Grafik 3.9 Jajak Pendapat Konsumsi Jambore IBBS Periode 2016-2019



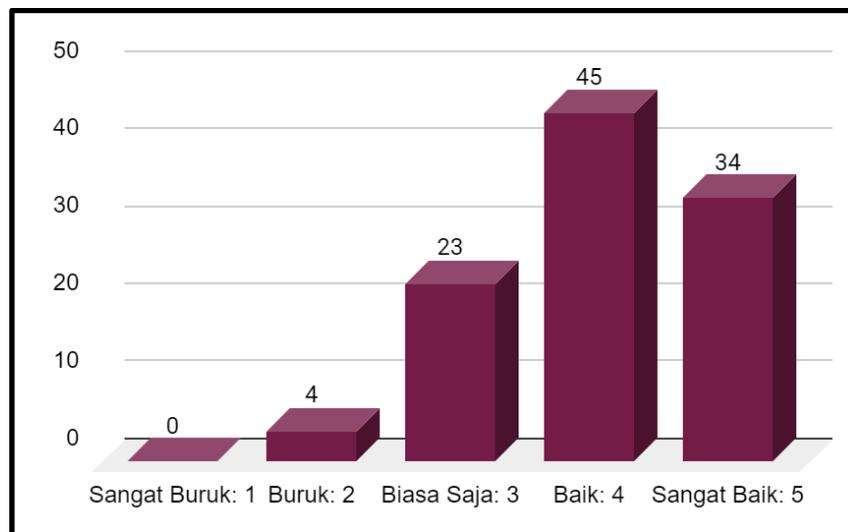
Grafik 3.10 Jajak Pendapat Akomodasi Jambore IBBS Periode 2016-2019

Grafik jajak pendapat di atas menunjukkan tingkat kepuasan dalam hal konsumsi dan akomodasi Jambore IBBS Periode 2016-2019. Mayoritas responden sejumlah 40 orang menyatakan lokasi acara Jambore IBBS secara keseluruhan “baik” dengan skor rata-rata 3,95. Begitu pula terkait akomodasi Jambore IBBS, 35 responden menilai “baik” dengan skor rata-rata 3,85.



Grafik 3.11 Jajak Pendapat Dampak yang Dihasilkan Jambore IBBS Periode 2016-2019



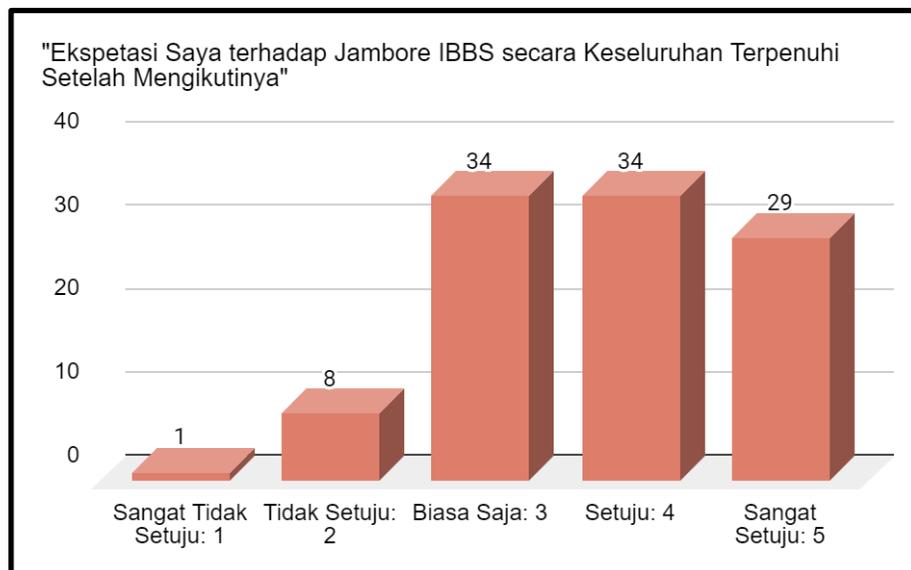


Grafik 3.12 Jajak Pendapat Kepuasan Secara Umum Jambore IBBS Periode 2016-2019

Grafik jajak pendapat di atas menunjukkan tingkat kepuasan dalam dampak yang dihasilkan dan kepuasan secara umum Jambore IBBS Periode 2016-2019. Mayoritas responden sejumlah 40 orang menyatakan lokasi acara Jambore IBBS secara keseluruhan “sangat baik” dengan skor rata-rata 4,05. Sedangkan, terkait kepuasan secara keseluruhan Jambore IBBS, 45 responden menilai “baik” dengan skor rata-rata 4,03.

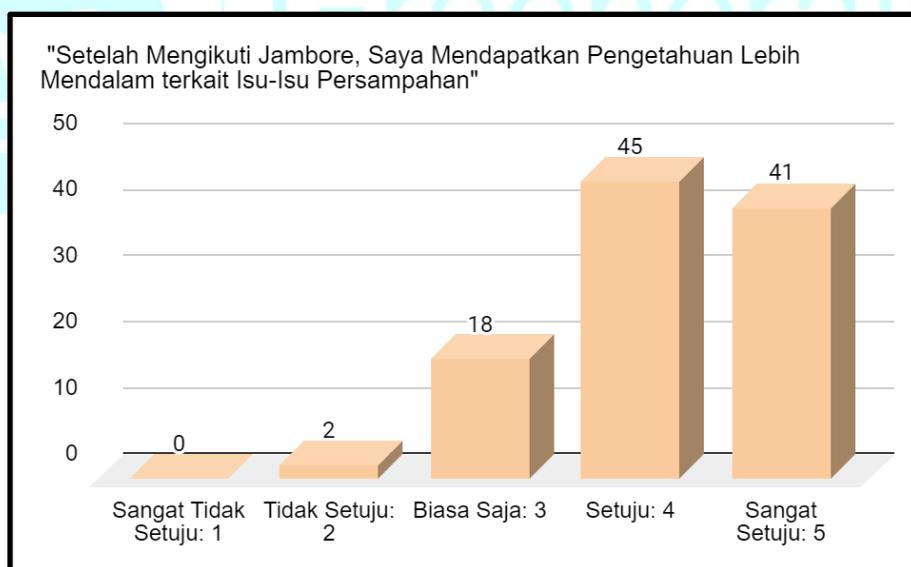
Adapun terkait evaluasi Jambore IBBS Periode 2016-2019, mayoritas responden menyatakan bahwa seleksi peserta Jambore IBBS harus terus diperketat agar peserta yang hadir memiliki komitmen dan kapabilitas untuk mengimplementasikan rencana aksi di daerah masing-masing. Selain itu, rekomendasi dari hasil Jambore IBBS harus disinergikan dengan agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dikolaborasikan dengan unsur swasta dan masyarakat untuk menghasilkan dampak yang luas dan nyata. Yang terakhir, pada pelaksanaan Jambore IBBS penerapan konsep *less waste* harus terus dipertahankan pada Jambore IBBS tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, menurut responden konten acara merupakan evaluasi yang harus terus diperbaiki dalam pelaksanaan Jambore IBBS. Menurut responden, salah satu sesi yang penting untuk ditingkatkan ialah sesi pembelajaran mengenai pengelolaan persampahan yang disampaikan dari praktisi terkait dan disertai dengan kunjungan langsung ke lokasi percontohan yang dapat direplikasi oleh peserta di daerahnya masing-masing. Selain itu, responden juga menyarankan agar sesi saling *sharing* antar-peserta diperbanyak karena peserta yang terpilih untuk hadir dalam Jambore IBBS merupakan praktisi pengelolaan persampahan yang juga memiliki kapabilitas serta dalam rangka menciptakan gerakan akar rumput yang berdampak luas dalam percepatan capaian target Indonesia Bebas Sampah pada tahun 2025.

## Survey Dampak Jambore IBBS



Grafik 4.1 Pemenuhan Ekspektasi Responden Jambore IBBS Periode 2016-2019

Secara umum, responden menyatakan memiliki ekspektasi sebelum menghadiri Jambore IBBS yaitu untuk saling bertukar informasi, membangun relasi, dan membangun gerakan di daerah bersama alumni Jambore lainnya. Dari ekspektasi tersebut, jumlah responden yang menyatakan “setuju” dan “biasa saja” bahwa saat menghadiri Jambore IBBS ekspektasi mereka telah tercapai sama yaitu 34 orang dengan skor rata-rata 3,77.

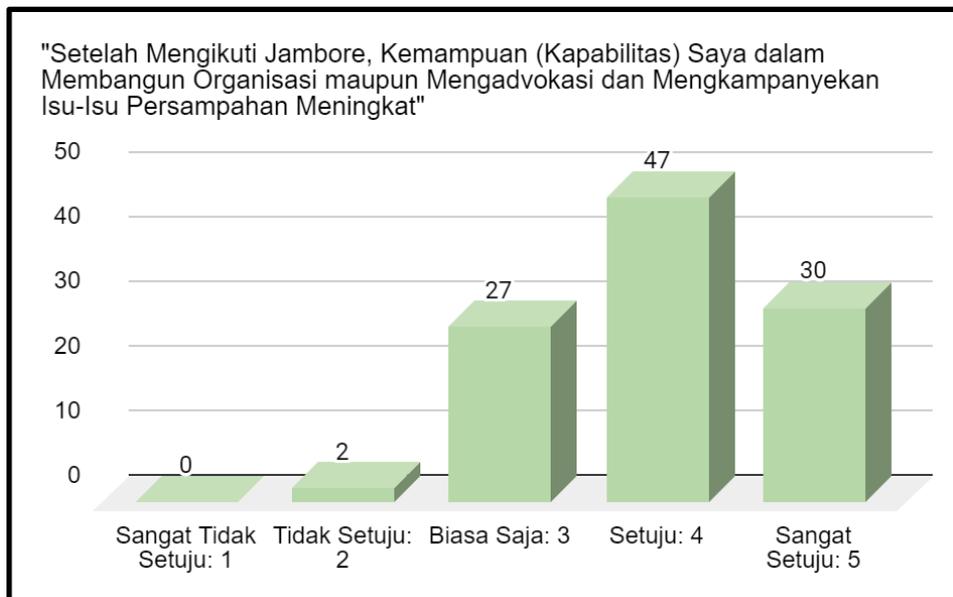


Grafik 4.2 Peningkatan Pengetahuan Responden Jambore IBBS Periode 2016-2019

Dalam hal peningkatan pengetahuan, mayoritas responden sejumlah 45 orang menilai “setuju” bahwa setelah mengikuti Jambore IBBS responden mendapatkan pengetahuan lebih mendalam terkait isu-isu persampahan dengan skor rata-rata 4,18. Adapun pengetahuan yang didapatkan oleh responden saat mengikuti Jambore IBBS antara lain informasi terkait agenda pemerintah pusat terkait Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan agenda pemerintah daerah terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang disampaikan pada sesi sarasehan dan rembuk lintas pakar persampahan, serta inisiatif-inisiatif pegiat peduli persampahan di akar rumput yang disampaikan pada sesi *workshop* lintas pegiat peduli persampahan. Responden juga memberikan masukan agar ditambahkan sesi bagi perusahaan yang memiliki program *Corporate*

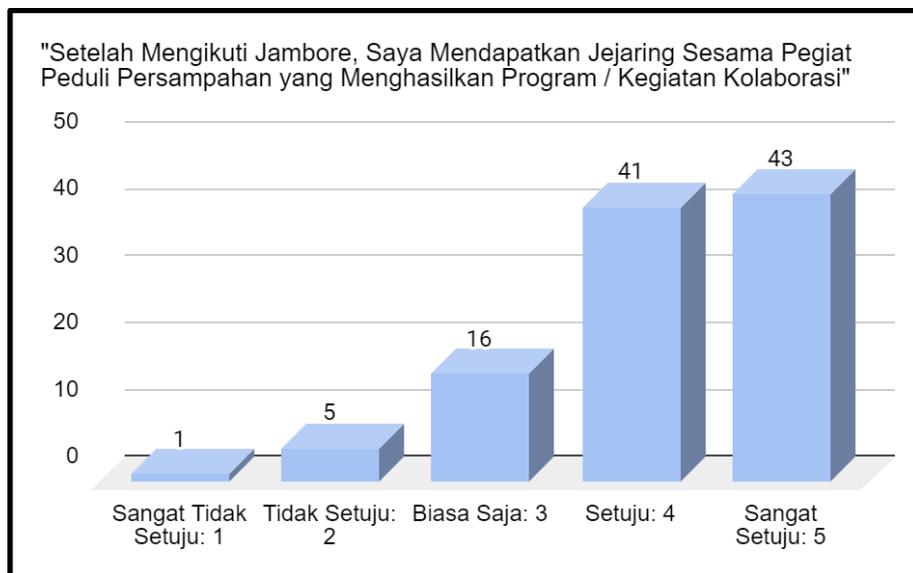


*Social Responsibility* (CSR) bertemakan isu peduli persampahan agar dapat dikolaborasikan dengan pegiat peduli persampahan di daerah untuk menghasilkan dampak yang lebih luas.



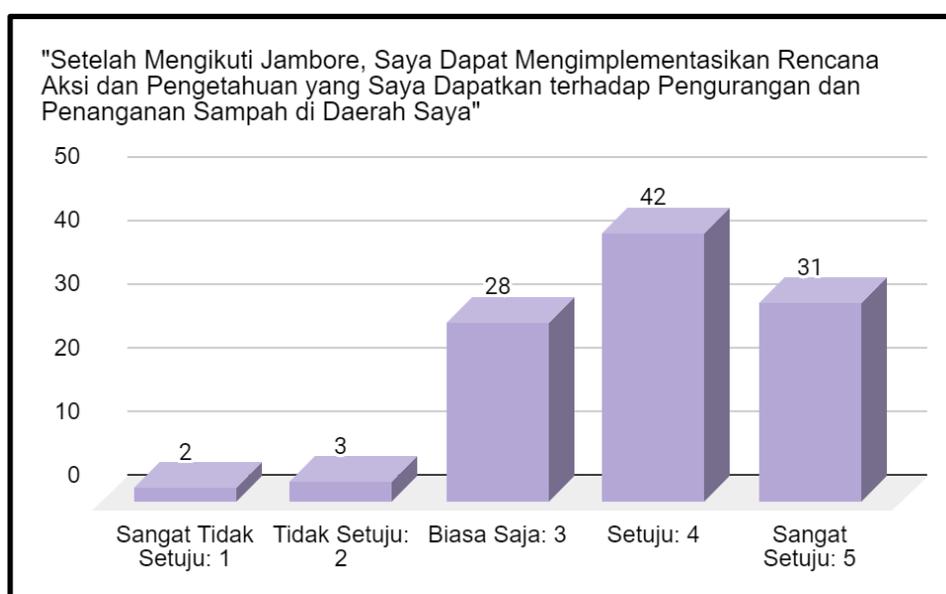
Grafik 4.3 Peningkatan Kapabilitas Responden Jambore IBBS Periode 2016-2019

Dalam hal peningkatan kapabilitas, mayoritas responden sejumlah 47 orang menilai "setuju" bahwa setelah mengikuti Jambore IBBS responden mendapatkan peningkatan kemampuan (kapabilitas) dalam membangun organisasi maupun mengadvokasi dan mengkampanyekan isu-isu persampahan dengan skor rata-rata 3,99. Adapun kapabilitas yang didapatkan oleh responden saat mengikuti Jambore IBBS antara lain membangun jejaring untuk menciptakan gerakan kolaborasi yang masif, memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye digital, analisis pemangku kepentingan, hingga mengadvokasi, beraudiensi, serta bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam hal agenda dan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan persampahan. Selain itu, menurut responden, keterampilan yang juga didapatkan saat mengikuti Jambore IBBS ialah alternatif dalam memanfaatkan dan mengolah sampah dengan cara sederhana yang tidak kalah penting untuk dapat diterapkan pada daerah masing-masing pasca Jambore IBBS. Responden juga memberikan masukan agar ditambahkan sesi pelatihan penggalangan dana untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta Jambore IBBS dalam menyusun perencanaan program hingga melakukan penggalangan dana.



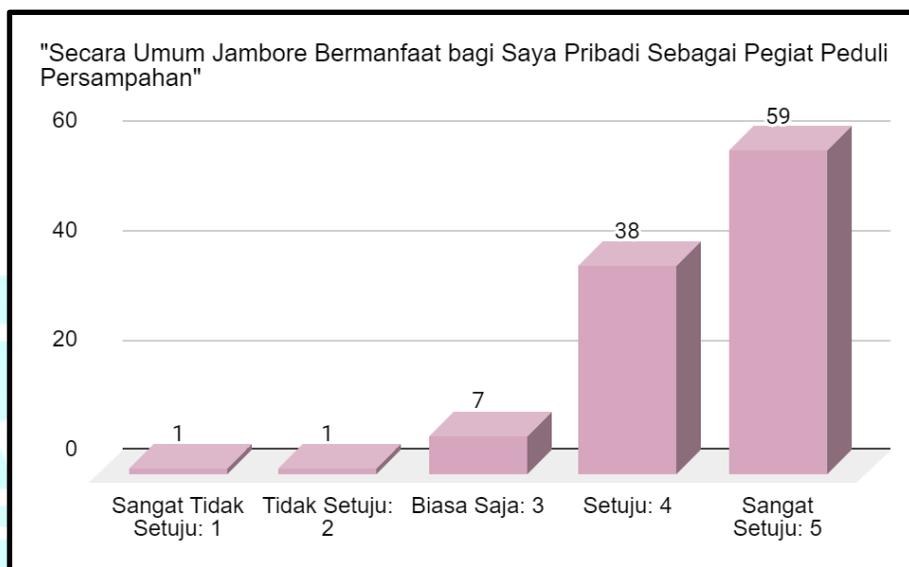
Grafik 4.4 Peningkatan Jejaring Responden Jambore IBBS Periode 2016-2019

Dalam hal peningkatan jejaring, mayoritas responden sejumlah 43 orang menilai “sangat setuju” bahwa setelah mengikuti Jambore IBBS responden mendapatkan jejaring sesama pegiat peduli persampahan yang menghasilkan program / kegiatan kolaborasi dengan skor rata-rata 4,13. Adapun bentuk program kolaborasi yang responden selenggarakan pasca Jambore IBBS sangat beragam, mulai dari memperkuat pengetahuan dengan membuat kelas daring yang diisi oleh sesama pegiat peduli persampahan sesama alumni Jambore IBBS, kegiatan aksi bersih (*clean up*) bersama, membuat kampanye dan advokasi publik bersama, melakukan sosialisasi dan edukasi agenda dan kebijakan pemerintah yang telah disampaikan pada saat Jambore IBBS, pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pegiat peduli persampahan lainnya sesama alumni Jambore IBBS, dan lain sebagainya. Mayoritas program / kegiatan kolaborasi pasca Jambore IBBS diselenggarakan secara serentak pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Selain itu, beberapa responden menyampaikan bahwa mereka juga turut menyelenggarakan Jambore Bersih dan Bebas Sampah di tingkat daerah. Responden juga memberikan masukan agar adanya pemantauan penyelenggaraan Jambore Bersih dan Bebas Sampah di tingkat daerah agar dapat terdata dan lebih terukur terkait dampak dari hasil Jambore IBBS di tingkat daerah.



Grafik 4.5 Implementasi Hasil Jambore IBBS Periode 2016-2019 oleh Responden

Dalam hal implementasi rencana aksi, mayoritas responden sejumlah 42 orang menilai “setuju” bahwa setelah mengikuti Jambore IBBS responden dapat mengimplementasikan rencana aksi dan pengetahuan yang didapatkan terhadap pengurangan dan penanganan sampah di daerah masing-masing dengan skor rata-rata 3,92. Adapun kontribusi responden dalam hal pengurangan maupun penanganan sampah sangat beragam, mulai dari secara pribadi mengurangi penggunaan material sekali pakai, menggunakan material yang dapat digunakan ulang, dan mengolah sampah pribadi di sumber; menerapkan konsep *less waste* ketika menyelenggarakan suatu acara; memungut, angkut, dan mengolah sampah melalui kegiatan pungut sampah; melakukan pembinaan masyarakat dalam penerapan pengurangan dan pemilahan sampah di sumber hingga menciptakan kawasan bebas sampah; membentuk maupun mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah berbasis sumber seperti bank sampah maupun TPS 3R; dan kontribusi lainnya.



Grafik 4.6 Manfaat Jambore IBBS Periode 2016-2019 terhadap Responden

Dalam hal kebermanfaatannya pelaksanaan Jambore IBBS secara umum, mayoritas responden sejumlah 59 orang menilai “sangat setuju” bahwa secara umum Jambore IBBS bermanfaat bagi responden secara pribadi sebagai pegiat peduli persampahan, dengan skor rata-rata 4,44. Adapun manfaat secara umum dari pelaksanaan Jambore IBBS antara lain meng-*update* agenda dan kebijakan pemerintah pusat, mempelajari kebijakan pemerintah daerah tuan rumah Jambore IBBS yang dapat diterapkan di daerah masing-masing, memperluas jejaring sesama pegiat peduli persampahan di seluruh daerah di Indonesia, berpartisipasi sekaligus mengimplementasikan rencana aksi di daerah masing-masing pasca Jambore IBBS.

# PROGRAM LANJUTAN PASCA JAMBORE IBBS

## Workshop Sinkronisasi *Stakeholder* Bidang Persampahan



Pasca diselenggarakannya Jambore #BebasSampah pertama pada 2016 di Kota Solo, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memfasilitasi panitia Jambore #BebasSampah untuk menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi *Stakeholder* Bidang Persampahan di Kota Solo tepat di hari setelah penyelenggaraan Jambore #BebasSampah 2016, yaitu 5-6 September 2016.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Workshop Sinkronisasi *Stakeholder* Bidang Persampahan, antara lain:

- Memperoleh gambaran mengenai isu, tantangan dan kendala persampahan yang dihadapi di Indonesia;
- Kesepakatan *baseline* kondisi persampahan eksisting;
- Memperoleh gambaran mengenai upaya penanganan sampah yang telah dilakukan (eksisting) serta para pelaku yang terlibat di dalamnya;
- Sinkronisasi program terkait pengelolaan sampah dari masing-masing *stakeholder*;
- Mengkaji dan merumuskan peta perencanaan penanganan persampahan di Indonesia;
- Tersusunnya *roadmap* yang implementatif untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2020;
- Pembagian kewenangan dan tugas antara *stakeholder* (siapa melakukan apa) untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2020.

Pada pelaksanaannya, workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari enam belas Kementerian/Lembaga, sembilan Pemerintah Daerah, sepuluh sektor swasta, dan empat belas LSM/komunitas.

<sup>4</sup> Cipta Karya Kementerian PUPR, <http://ciptakarya.pu.go.id/water/post.php?q=5919-Stakeholder-Bidang-Persampahan-Diskusi.html>

## Aspirasi Penegakan Peraturan Persampahan Indonesia

### Pak Presiden, Mari Tegakkan Peraturan PERSAMPAHAN di Indonesia !



8.921 telah menandatangani. Mari kita ke 10.000.

Emil Kaburuan menandatangani petisi ini

Mapala Jalek Hitam Polibisnis menandatangani petisi ini

Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan...

**Sebarkan di Facebook**

Kirim pesan Facebook

Kirim pesan email kepada teman-teman

Tweet ke pengikutmu

Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan #BebasSampah memulai petisi ini kepada **Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)**

**Yang kami hormati dan banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo,**

Pasca pelaksanaan Jambore IBBS 2017, salah satu rekomendasi utama yang dihasilkan dari *Focus Group Discussion* adalah pentingnya penegakan peraturan yang telah banyak diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan persampahan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut nyata, relawan Bergerak Indonesia Bebas Sampah (BIBS) bersama Greeneration Foundation, pada pelaksanaan #PESAN2018 (Peduli Sampah Nasional Tahun 2018), menginisiasi “Aspirasi Penegakan Peraturan Persampahan” melalui platform petisi online [change.org/AspirasiBebasSampah](https://change.org/AspirasiBebasSampah). Aspirasi ini menyoroti penerbitan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah nyatanya tidak cukup untuk mengentaskan masalah persampahan karena belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan melalui komitmen pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Adapun contoh belum maksimalnya penegakan peraturan persampahan hingga saat ini, dirujuk pada dua Peraturan Perundang-undangan utama, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012.

Pada rangkaian peringatan #PESAN2018, tepatnya pada tanggal relawan BIBS dan Greeneration Foundation diterima oleh Menko Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk beraudiensi dan menyampaikan Aspirasi Penegakan Peraturan Persampahan. Selama peringatan #PESAN2018, relawan BIBS juga melakukan audiensi ke berbagai *stakeholder* termasuk Kementerian/Lembaga, antara lain, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK, Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya Kemenko PMK, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian KP, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Kementerian Pora, Kasubdit Pengelolaan Persampahan Kementerian PUPR, Staf Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Kementerian Dagri, Staf Direktorat Kemitraan Komunikasi Kementerian Kominfo. Hingga saat ini aspirasi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 10.000 masyarakat secara online dan offline dan masih berupaya untuk menyampaikan secara langsung dokumen Rekomendasi Kebijakan kepada Pak Presiden Joko Widodo.

## Aksi Bersih Serentak Indonesia Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia



Pasca dilaksanakannya Jambore IBBS 2018, dalam memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia yang mengangkat tema “*Municipal Solid Waste Management*,” Gerakan Indonesia Bersih bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan “Aksi Bersih Serentak Indonesia” pada 28 September 2018 - 3 Oktober 2018 di 34 Provinsi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada “Aksi Bersih Serentak Indonesia” adalah kegiatan bersih-bersih yang dilakukan setiap hari selama 28 September 2018 - 3 Oktober 2018 di berbagai area, seperti daratan (jalan, pasar, terminal, perkantoran, permukiman, sekolah, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat ibadah), pantai, laut, sungai dan bantaranya.

Di tiap provinsi, pegiat peduli persampahan yang merupakan alumni Jambore IBBS dijadikan sebagai koordinator yang mewakili komunitas maupun pihak swasta untuk dihubungkan kepada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi-instansi terkait untuk saling berkolaborasi dalam melaksanakan Aksi Bersih Serentak Indonesia di tingkat provinsi.

Adapun hasil dari kegiatan Aksi Bersih Serentak Indonesia selama enam hari di 34 provinsi berhasil melibatkan 13.315 orang yang tersebar di 165 titik aksi bersih. Selain itu, jumlah sampah total yang berhasil dipungut dan diangkut ialah 63.022,64 kg, yang terdiri dari 15.405,46 kg sampah plastik, 22.085,93 kg sampah daur ulang (*recyclable*), 25.531,24 kg sampah residu (*non-recyclable*). Sebagai tindak lanjut pengolahan sampah hasil dari aksi bersih yang telah ditimbang, untuk jenis sampah plastik diserahkan kepada TPST 3R agar dapat dipilah secara lebih spesifik dan diolah kembali, sampah daur ulang (*recyclable*) diserahkan kepada Bank Sampah / Pengepul / Pemulung agar dapat dimanfaatkan ulang, sampah residu (*non-recyclable*) diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar dapat dipilah secara lebih spesifik dan diangkut ke TPA.

## Kajian Standardisasi Pembiayaan Pengelolaan Persampahan



Salah satu rekomendasi dari Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (IBBS) tahun 2018 di Malang Raya yang mengangkat tema “Rembuk Solusi Pembiayaan Pembangunan dan Keberlanjutan Pengelolaan Persampahan” adalah terbentuknya standar pembiayaan berbasis pengelolaan sampah yang baik, benar dan bertanggung jawab melalui skema pembiayaan yang berkeadilan. Rekomendasi tersebut yang menjadi latar belakang dilaksanakannya kajian “Persiapan Standar Pembiayaan untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Juli - November 2019 dan dilanjutkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Kajian Skema Pendanaan Pengelolaan Persampahan” pada Agustus - Desember 2019.

Adapun tujuan dari kedua kajian tersebut disusun untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi skema pendanaan persampahan yang dapat diimplementasikan di level kabupaten/kota maupun provinsi melalui reformasi standarisasi pembiayaan yang layak dan inovasi skema pembiayaan yang berkeadilan. Selain itu, ruang lingkup dari kedua kajian tersebut, antara lain:

- Menganalisis sistem retribusi sampah yang sudah diimplementasikan di Indonesia, termasuk di dalamnya metode pengumpulan, analisis keekonomian, dan lain-lain;
- Menyusun kajian analisis skema pendanaan persampahan yang dapat diimplementasikan di level kabupaten/kota/provinsi melalui reformasi sistem retribusi sampah dan/atau inovasi pendanaan lainnya;
- Memformulasikan kalkulator retribusi sampah untuk dapat diimplementasikan di kabupaten/kota di Indonesia;
- Menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pendanaan pengelolaan sampah di Indonesia.

Kedua kajian tersebut juga dijadikan sebagai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembiayaan Pengelolaan Persampahan yang sedang dalam proses penyusunan.

## Pemberdayaan Masyarakat “Bijak Kelola Sampah” di Delapan Provinsi



Pasca pelaksanaan Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah (IBBS) tahun 2019 di Provinsi Bali, sebagai implementasi jangka panjang pasca Jambore IBBS, salah satu sponsor yaitu PT. Agung Concern bersama Greeneration Foundation melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang bernama Agung Concern Bijak Kelola Sampah. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan secara serentak di delapan provinsi, antara lain provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, dengan melibatkan tujuh komunitas pegiat peduli persampahan alumni Jambore IBBS.

Adapun tujuan dari program ini adalah memberdayakan masyarakat lokal yang semangat menyelesaikan permasalahan sampah di wilayahnya, dengan fokus pada edukasi melibatkan karyawan dan masyarakat lokal agar sampah tersebut dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu dilakukan pula upaya perbaikan pada tempat pengelolaan sampah sementara. Selain itu, target dari program ini adalah membentuk 80 “*ranger*” yang terdiri dari 40 staf Agung Concern dan 40 masyarakat di tiap provinsi untuk secara berkala diberikan pelatihan mengenai pengelolaan persampahan dan konsep *less and zero waste event*.

Hingga saat ini, program Agung Concern Bijak Kelola Sampah telah membentuk tujuh bank sampah di tujuh provinsi untuk dapat mendukung masyarakat dapat mengimplementasikan pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab secara berkelanjutan, antara lain Bank Sampah Desa Jenggalu (Bengkulu), Bank Sampah Sahabat (Jambi), Bank Sampah Griya Sappah (Lampung), Bank Sampah Aksi Desa Lembar Selatan (Nusa Tenggara Barat), Bank Sampah Tanjung Riau Berser (Kepulauan Riau), Bank Sampah Berlin Mandiri (Riau), dan Bank Sampah Desa Mambang (Bali).



# PROFIL PESERTA JAMBORE IBBS

## Tini Martini Tapran - Jawa Barat



Ibu Tini Martini Tapran atau yang biasa disapa dengan Ibu Tini adalah ketua dari Lembaga Swadaya Masyarakat, GSSI (Generasi Semangat Selalu Ikhlas) yang berpusat di Kota Bandung. Yayasan GSSI adalah institusi mandiri yang dibentuk pada 17 Mei 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan dalam masyarakat. Adapun visi dari Yayasan GSSI adalah membentuk masyarakat yang bahagia dalam lingkungan, sedangkan misinya ialah mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat serta melibatkan pemuda sebagai agen pembangunan dan juga menumbuhkan budaya literasi. GSSI bergerak secara khusus dalam bidang pendidikan, sosial, dan lingkungan hidup, yang salah satunya melalui modul pendidikan pengelolaan sampah yang dikemas dalam bentuk modul "Pas Geber" (Pasukan Gerakan Bersih). GSSI juga ikut berpartisipasi dalam program Pemerintah Kota Bandung, yaitu Kang Pisman (Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan).

Bu Tini bersama 10 anggota staf Yayasan GSSI yang dipimpinya telah mengikuti kegiatan Jambore IBBS selama tiga tahun berturut-turut dan berperan aktif terhadap masyarakat sekitar dengan terus berupaya memberikan edukasi dan pelatihan kepada seluruh lapisan masyarakat dari yang terkecil (RT/RW) hingga ke instansi pemerintahan terkait. Berbagai program GSSI untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah Program Penggerak Kampung, Buku untuk Sahabat, Sekolah Relawan dan *Kids Club*. Sejak tahun 2010 GSSI telah melakukan pendampingan di berbagai permukiman seperti Sarongge Cianjur (2013), Rumah Mentari Cimenyan (2014), Kelurahan Merdeka (2011-2013), Cibunut (2015-2020), RW 01 Cibangkong (2019), RW 06 Balonggede (2019-2020), dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terkait pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumber. Dari berbagai program pendampingan masyarakat oleh Yayasan GSSI menghasilkan berbagai penghargaan antara lain, Juara 1 pengelolaan sampah tingkat Jawa Barat versi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Ecovillage Award 2018, Penghargaan dari Walikota Bandung dan masih banyak lagi.



## Faesal Adam - Kudus Jawa Tengah



Faesal Adam adalah peserta dari seluruh pelaksanaan Jambore IBBS sejak tahun 2016 hingga 2019, di mana menjadi salah satu *founder* dari KRESEK (Kreasi Sampah, Ekonomi Kota) Indonesia. KRESEK Indonesia merupakan komunitas sosial yang fokus ada permasalahan lingkungan, terutama pada permasalahan sampah dan bagaimana cara mengelolanya. Kresek Indonesia terbentuk pada 27 September 2015 di Kabupaten Kudus dan sekarang sudah ada di dua kota, yaitu kota Kudus dan kota Solo. Selama lebih dari tiga tahun Kresek sudah menginisiasi berbagai gerakan, diantaranya adalah garuk sampah massal, kampanye diet kantong plastik, pembagian 1.000 *totebag*, pembuatan biopori, dan lainnya, di mana sekarang sedang fokus pada program Sedekah Sampah dan Desa Binaan.

KRESEK Indonesia dengan aktif terus mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2025 melalui beberapa program, salah satunya adalah Program Sedekah Sampah, yang merupakan kegiatan pengumpulan sampah di mana hasil dari penjualan sampah tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial, lingkungan dan pendidikan. Contoh penyaluran dana dari hasil penjualan sampah yang telah disedekahkan adalah pemberian Beasiswa Peduli Lingkungan untuk siswa/i tingkat menengah ke atas. Hasil seleksi yang diikuti oleh 43 pendaftar dari 18 sekolah di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, telah terpilih sebanyak total 15 penerima beasiswa yang disertai dengan berbagai pelatihan *softskill*. KRESEK Kudus juga melaksanakan program pemberdayaan Desa di Desa Ngembalrejo RT 02/04 dalam hal dengan pengurangan dan pengelolaan sampah yang menghasilkan Bank Sampah Masdulah (Masyarakat Peduli Sampah), Kreta Pelangi (Kreasi Tangan Peduli Anak Negeri), serta perpustakaan. Sedangkan, KRESEK Solo juga memiliki Bank Sampah Binaan di daerah Teposanan, Solo dan di desa Ngembalrejo, Kudus. Setiap bulan KRESEK Indonesia mendapatkan sedekah sampah sebanyak 75-100 kg sampah dan minyak jelantah sekitar 60 kg. Adapun seluruh program KRESEK Indonesia dapat diakses di [Kresek.org](http://Kresek.org).



Bapak Hamzah juga merupakan peserta dari seluruh pelaksanaan Jambore IBBS sejak tahun 2016 hingga 2019, di mana Beliau menjadi *founder* dari Yayasan BIKAL Karya Lestari. Yayasan BIKAL awal mulanya merupakan sebuah komunitas yang dibentuk sejak tahun 1996 dan berbasis di Provinsi Kalimantan Timur karena adanya keresahan yang timbul akibat penurunan kualitas lingkungan hidup dan rendahnya akses masyarakat terhadap aktivitas bisnis dan ekonomi. Hingga pada akhirnya, Yayasan Bina Kelola Lingkungan (BIKAL) dibentuk beberapa aktivis di Samarinda untuk dijadikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat berbadan hukum pada tahun 2011, di mana sesuai SK Menkumham namanya menjadi Yayasan BIKAL Karya Lestari.

Sejak pertama kali dibentuk hingga kini, Yayasan Bikal berfokus pada penguatan kelompok masyarakat dan advokasi kebijakan terkait isu pesisir dan laut di Kota Bontang sampai sekarang dengan melakukan pendampingan masyarakat di beberapa desa yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Kutai khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup di desa tersebut. Sepulang dari Jambore IBBS pertama di Kota Solo, Pak Hamzah bersama Yayasan BIKAL menginisiasi untuk membentuk *Trash Academy* yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dan membuat Duta Peduli Sampah di Kota Bontang sebagai salah satu pencapaian dari Bikal terkait dengan pengelolaan sampah hasil dari mengikuti JIBBS dan akhirnya terlaksana pada tahun 2018 melakukan sosialisasi dan pendidikan lingkungan hidup di masyarakat seperti Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di beberapa perusahaan di Kalimantan Timur, Program Studi Pemetaan Sosial CSR, Program Fasilitasi Pendampingan Kelompok Mitra Binaan, Program Studi Penyusunan Desain adapun Program Penguatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di TN Kutai Melalui Desa Konservasi 2018–2019. Yayasan Bikal memiliki tiga desa binaan yaitu Desa Sangkima, Desa Teluk Singkama, dan Desa Sangatta Selatan.





Pak Andi Nurdianza adalah Manajer Program Lingkungan dari Yayasan Peduli Negeri (YPN) yang diinisiasi pada tahun 2007. YPN lahir dari sebuah keresahan dari beberapa rekan-rekan pemerhati kegiatan lingkungan. Pada bulan Mei 2008, muncul ide agar komunitas ini membuat sebuah lembaga beberapa yayasan atau LSM yang bergerak dalam bidang kepedulian kepada negeri terutama soal lingkungan. Visi dari YPN adalah menjadi lembaga atau yayasan yang profesional dalam meningkatkan peran serta masyarakat dunia pendidikan untuk mewujudkan lingkungan dan kesehatan yang lebih baik kedepannya, sedangkan misinya adalah meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, meningkatkan kerjasama dalam hal edukasi, advokasi, dan pendampingan sekolah sehat.

Yayasan Peduli Negeri memiliki tiga program utama yaitu program lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Pada program lingkungan, YPN melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah terkhusus bank sampah dan juga ikut andil dalam program-program lingkungan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar. Sedangkan, pada program kesehatan, YPN juga melakukan kegiatan edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), mengadakan Program bank sampah edukasi lingkungan di sekolah, dan juga menyusun program pemerintah kota dalam konteks pengurangan dan pengelolaan persampahan. Sejak YPN dibentuk pada tahun 2007, pencapaian terbesar sampai saat ini yang telah berhasil dilakukan adalah mampu memberikan perubahan paradigma dan perilaku tentang lingkungan melalui program *Makassar Green and Clean*, khususnya pengolahan sampah kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Kota Makassar yang dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sejak tahun 2014 hingga 2018 Yayasan Peduli Sampah telah mengelola +/- 3.000 ton sampah atau sebanyak 750 ton sampah per tahunnya yang tersebar di dua bank sampah induk, 621 bank sampah umum, 29 bank sampah instansi, dan 246 bank sampah sekolah.





Renung Rubiyatadji ialah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Pada tahun 2004 sampai dengan 2008 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) digabung dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (LH-ESDM). Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah, pada tahun 2008 Dinas LH – ESDM dipecah kembali menjadi dua perangkat daerah yaitu (1) Dinas Energi dan SDM, dan (2) Badan Lingkungan Hidup, yang menjadi awal mula pembentukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) hingga saat ini dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan.

Menindaklanjuti UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Kabupaten Malang memulai pada Tahun 2009 menginisiasi pengelolaan sampah terutama penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang semula *Open Dumping* memulai dengan *Controlled Landfill* menggunakan APBD. Kabupaten Malang juga menginisiasi *Integrated Resource Recovery Center*, yaitu tempat mengolah sampah organik yang mampu menghasilkan gas metana untuk bahan bakar generator sehingga menghasilkan listrik, dimana lumpur yang dihasilkan diproses hingga menjadi kompos padat organik dan pupuk cair organik. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah mendapatkan berbagai penghargaan seperti *Public Services of The Year* Jawa Timur tahun 2008, penghargaan Penyusun Terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), penghargaan “*Waste to Energy*” oleh Kementerian PUPR dan Anugerah Adipura kategori Kota Kecil tahun 2018 untuk Kota Kepanjen. Adapun capaian lainnya, pada tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah mengurangi sampah sebesar 8,7% atau 24.081 ton sampah per tahun dan terus mengalami peningkatan dalam hal pengurangan sampah dari tahun ke tahun menjadi 14,97% atau sebesar 43.146 ton sampah per tahun.



Pak Yanto merupakan bagian Dari TPST 3R Saling Asih yang merupakan TPST 3R yang baru dibentuk dan dikelola atas dasar Kemen PUPR TA 2019. Latar belakang dibangunnya TPS 3R di wilayah Jawa Barat ini memang telah direncanakan dan diusulkan oleh RW setempat dengan harapan dapat membangun sekaligus menjalankan sistem tata kelola TPST 3R, yang pertama yaitu sosialisasi dan konsultasi dengan para *stakeholder* persampahan (warga, pengangkut sampah, pengurus RW, kader, pengurus RT, dan kelurahan). Adapun sosialisasi dan konsultasi yang dimaksud ialah melakukan penyuluhan dari rumah ke rumah, dan memastikan seluruh warga mendapat informasi untuk segera memilah sampah dalam tiga jenis (organik, anorganik, lainnya). Kedua, melakukan persiapan sarana pengumpulan atau pengangkutan sampah terpilah dan sarana pengolahan sampah organik. Ketiga, penetapan retribusi warga, gaji petugas pengumpul/pengangkut. Keempat, melakukan pengolahan 100 persen sampah organik. Adapun program rutin dari TPST 3R ini adalah memastikan bahwa sampah anorganik yang telah dipisahkan sejak dari rumah warga dan dikumpulkan oleh petugas seminggu sekali dijual kepada pengepul besar dan memastikan sampah organik diolah (dikomposkan).

Pencapaian dari TPST 3R sejak awal dibentuk adalah mendapatkan apresiasi dari Walikota Bandung karena sudah berhasil mengolah sampah anorganik yang berupa botol plastik kemasan air mineral menjadi instalasi media bakteri untuk komponen IPAL komunal. Produk media bakteri ini juga digunakan pada IPAL komunal di beberapa daerah. Sampai saat ini sudah terdapat 365 Kartu Keluarga (KK) yang dilayani oleh TPST 3R dan berhasil mengelola 2,5 ton (1,9 ton organik dan 6 kwintal anorganik) sampah per tahunnya.



Pak Gemal Bakti merupakan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Lambung Lestari TPST 3R yang berasal dari Aceh. TPST 3R Lambung Lestari berkegiatan mengumpulkan sampah dari tiap rumah, secara spesifik satu desa terdapat 380 rumah. Visi dari TPST 3R Lambung Lestari adalah mampu mengelola sampah di pesisir Meuraksa dengan konsep 3R. Adapun misinya adalah membuat masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan mampu memilahnya, memasukkan skema pendanaan pengelolaan persampahan dalam alokasi dana desa, mengoptimalkan pengolahan sampah sehingga bernilai ekonomis tinggi, meningkatkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan daur ulang dan melakukan pendataan terhadap sampah plastik sesuai dengan jenis dan mereknya. Program pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) artinya memfasilitasi masyarakat di kawasan permukiman padat di perkotaan di beberapa kota di Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan pilihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka. Kebijakan Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan untuk pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat yang menerima manfaat (KSM) melakukan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya, kemudian mengelola sampah di TPST 3R yang telah dibangun pemerintah pusat. Sejauh ini sudah terdapat 400 rumah yang tergabung dalam pelayanan TPST 3R Lambung Lestari dan berhasil mengumpulkan 500 Kg plastik setiap bulannya.

Dari hasil pengumpulan sebagian sampah yang sudah dipilah, petugas TPST 3R meletakkannya di tempat tertentu yang kemudian akan diangkut menggunakan becak ke TPST 3R untuk dipilah kembali dan dibersihkan. Sejauh ini TPST 3R telah mendapat berbagai prestasi yaitu, Juara 3 TPST 3R terbaik dalam merancang *business plan* se Indonesia bagian barat, mendapatkan penghargaan sebagai Kampung Bersih se-Banda Aceh dan masuk dalam Desa Proiklim kategori media. Sejauh ini sudah terdapat 400 Kartu keluarga (KK) yang telah bergabung di TPST 3R Lambung Lestari, dan berhasil membuat pupuk kompos padat sebanyak 500 kg dan mengumpulkan 500 kg sampah plastik per bulannya.





Ibu Syalfitri merupakan *founder* dari Komunitas Junjung Birru yang sekaligus menjadi bank sampah di Kota Palembang. Komunitas Junjung Birru memiliki visi mewujudkan lingkungan sehat, bersih, asri dan mandiri. Sedangkan misi Junjung Birru yang pertama, mengubah paradigma masyarakat mengenai sampah, kedua membangun jiwa yang sehat, bersih, dan sejahtera berwawasan lingkungan, ketiga menanamkan rasa berperan serta melestarikan lingkungan pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun luar lingkungan rumah, dan yang terakhir membuka wawasan masyarakat sadar dan berperan serta peduli lingkungan dan alam semesta raya. Kegiatan yang dilakukan Komunitas Junjung Birru adalah sosialisasi dan edukasi dari tingkat RT, RW, Sekolah, Universitas, BUMN, hingga Pemerintah. Junjung Birru mengadakan kunjungan ke berbagai tempat yang edukatif, lokal, nasional hingga ke mancanegara sebanyak 12 negara. Komunitas Junjung Birru juga memiliki bank sampah, program sekolah anak usia dini dengan sistem pembayaran iuran sekolah menggunakan sampah, serta posyandu lansia di mana sistem pembayarannya juga menggunakan sampah, dimana terdapat 20-25 orang siswa/i yang menggunakan sistem pembayaran pakai sampah. Setiap bulan Komunitas Junjung Biru mengumpulkan sekitar 30-50 Kg sampah dan telah melakukan sosialisasi peduli persampahan ke 50 desa.

Pencapaian terbesar yang didapatkan Bu Syalfitri dan Junjung Birru adalah mendapatkan penghargaan sebagai perempuan hebat di bidang lingkungan dari Walikota Palembang dan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2013, menjadi *Local Hero Pertamina Award Nasional* 2014, memperoleh predikat *Inspiring Women* dari Gubernur Sumatera Selatan pada hari Kartini tahun 2018.





Virly Yuriken ialah *Senior Project Manager* Bank Sampah Sorong Raya yang berbasis di Sorong, Papua Barat. Bank Sampah yang berdiri sejak tahun 2014 ini dikelola oleh yayasan dan koperasi. Koperasi bertugas untuk melakukan edukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga untuk masyarakat Sorong dan Raja Ampat, sedangkan yayasan bertugas dalam teknis operasional pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Sorong Raya. Adapun pendanaan yang didapatkan untuk yayasan berasal dari dana bantuan luar negeri, sedangkan untuk koperasi mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Indonesia. Selain itu, Bank Sampah yang memiliki beberapa armada *pick up*, truk, hingga kapal yang digunakan untuk pengangkutan sampah yang dioperasikan oleh 27 personil ini, juga berkontribusi dalam memberikan pelatihan untuk pembentukan pengelola Bank Sampah Waisai dan Sorong Selatan. Bank Sampah Sorong juga secara konsisten melakukan kegiatan *clean up*, sosialisasi dan pendampingan pengelolaan sampah untuk unit bank sampah dan nasabah.

Sejak Bank Sampah Sorong Raya dibentuk, hingga saat ini telah memiliki 96 unit bank sampah dengan lebih dari 3.000 nasabah yang tersebar di wilayah Sorong Papua dengan jumlah sampah 1 ton yang terkelola setiap harinya. Bank Sampah Sorong Raya juga berhasil mengumpulkan dan mengelola rata-rata 17 ton sampah plastik per tahun yang berasal dari darat maupun laut dan mengklaim bahwa dengan terbentuknya Bank Sampah Sorong Raya, timbulan sampah di Sorong Raya berkurang sekitar 40-50 persen.





Pak Iskandar Abd. Rahman yang berprofesi sebagai Kepala Bidang di Dinas Perikanan Kota Ternate merupakan pendiri dari Komunitas Sadar Sampah Kota Ternate (Kossakate) yang didirikan pada 15 Januari 2017 karena ia sering bersinggungan dengan kegiatan yang kerap berhubungan dengan wilayah dan masyarakat pesisir di mana ia sering menemukan sampah plastik yang mencemari laut yang dihasilkan baik oleh masyarakat pesisir, sampah kiriman dari pemukiman di dataran tinggi yang dibuang ke Barangka (kali mati), maupun sampah kiriman dari pulau-pulau lain yang terbawa arus hingga ke perairan Ternate. Belum lagi sampah yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Ternate yang seharusnya mencapai 5.593 kubik (100 ton), di mana rata-rata sampah yang dapat diangkut oleh petugas kebersihan hanya 3.623 kubik (65 ton perhari). Menyadari kapasitas layanan persampahan oleh instansi pemerintah daerah tidak mampu menangani permasalahan sampah, Pak Iskandar akhirnya menggalang kepedulian melalui gerakan bersih bersih pantai dan melibatkan masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan. Empat fokus utama Kossakate yakni, aksi nyata membersihkan sampah di kawasan kumuh untuk merangsang kepedulian masyarakat, menggalang relawan dan partisipan pemuda dan masyarakat sadar, kampanye sadar sampah di berbagai instansi lainnya, dan mendorong pengelolaan atau pemanfaatan sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Kossakate mendapat kepercayaan dan dukungan cukup baik, 35 tokoh dengan reputasi baik bergabung dalam dewan pembina dan 250 orang bergabung sebagai pengurus dan anggota. Kossakate telah memiliki komunitas binaan di beberapa kelurahan, dengan target hingga tahun 2020 komunitas binaan ini dapat dibentuk di 50-78 kelurahan di Kota Ternate, khususnya kelurahan yang diidentifikasi sebagai kawasan kumuh, rawan sampah, pusat jasa perdagangan, kawasan situs, wisata, pantai dan perairan di pusat kota, kawasan taman kota, atau ruang publik di tepi pantai, dan sejenisnya. Kossakate juga telah melakukan 40 kegiatan berupa aksi bersih sampah dan penanaman kesadaran di sekolah serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan visi dan tekad "Ternate Tara Cafarune" (Ternate Bersih 2025). Pada tahun 2018, Kossakate mendapatkan penghargaan dari Astra sebagai komunitas peduli lingkungan terbaik nasional.

